



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang, No. 16 Kebumen 54311 Telepon (0287) 381319, 381437 Fax. 381319
Email: Inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Kebumen, 27 Maret 2024

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



AMIN RAHMANURRASJID, S.H, M.H
NIP.19720723 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha ESA sehingga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *"Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota Kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun"*.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang diberikan, semoga LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, 27 Maret 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum..... 1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 15

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 46

BAB II CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH..... 50

2.1 Capaian Kinerja Makro 50

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 58

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 59

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 108

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 123

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 126

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 127

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja..... 129

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya 131

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah..... 133

2.3.5 Analisis Pencapaian Kinerja..... 135

2.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai..... 173

2.3.7 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja..... 200

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 218

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah..... 218

3.1.1 Target Kinerja 218

3.1.2 Realisasi 218

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah 220

3.2.1 Target Kinerja 220

3.2.2 Realisasi 220

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 221

4.1 Urusan Pendidikan 221

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 221

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 221

4.1.3 Alokasi Anggaran..... 222

4.1.4 Dukungan Personil..... 223

4.1.5 Realisasi 223

4.1.6	Permasalahan dan Solusi	226
4.2	Urusan Kesehatan.....	226
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	226
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	227
4.2.3	Alokasi Anggaran.....	231
4.2.4	Dukungan Personil.....	232
4.2.5	Realisasi	233
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	246
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	247
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	247
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	247
4.3.3	Alokasi Anggaran.....	250
4.3.4	Dukungan Personil.....	250
4.3.5	Realisasi	251
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	254
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	254
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	254
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	255
4.4.3	Alokasi Anggaran.....	256
4.4.4	Dukungan Personil.....	257
4.4.5	Realisasi	257
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	260
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	261
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	261
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	261
4.5.3	Alokasi Anggaran.....	265
4.5.4	Dukungan Personil.....	265
4.5.5	Realisasi	266
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	272
4.6	Urusan Sosial.....	273
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	273
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	274
4.6.3	Alokasi Anggaran.....	282
4.6.4	Dukungan Personil.....	282
4.6.5	Realisasi	283
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	293
4.7	Program dan Kegiatan.....	294
BAB V PENUTUP.....		300
LAMPIRAN.....		301

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen 3

Tabel 1. 2 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen 4

Tabel 1. 3 Keadaan suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 6

Tabel 1. 4 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2023 8

Tabel 1. 5 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen 9

Tabel 1. 6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2023 10

Tabel 1. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (unaudited)..... 13

Tabel 1. 8 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (unaudited)..... 14

Tabel 1. 9 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (unaudited)..... 14

Tabel 1. 10 Progam dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 26

Tabel 1. 11 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 43

Tabel 1. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 45

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023..... 50

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran..... 59

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kunci Hasil 108

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 123

Tabel 2. 5 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja 126

Tabel 2. 6 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2023 127

Tabel 2. 7 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja..... 127

Tabel 2. 8 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja..... 129

Tabel 2. 9 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya..... 131

Tabel 2. 10 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD 133

Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 135

Tabel 2. 12 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja IKM..... 137

Tabel 2. 13 Realisasi dan Capaian Kinerja Dari Sasaran Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel..... 138

Tabel 2. 14 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE 140

Tabel 2. 15 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Tujuan Kedua 141

Tabel 2. 16 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup 143

Tabel 2. 17 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah 144

Tabel 2. 18 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA)..... 146

Tabel 2. 19 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi..... 147

Tabel 2. 20 Capaian Dari Empat Sasaran 149

Tabel 2. 21 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia) 151

Tabel 2. 22 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan..... 153

Tabel 2. 23 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka..... 155

Tabel 2. 24 Realiasi dan Capaian Indikator kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 157

Tabel 2. 25 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah 158

Tabel 2. 26 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 160

Tabel 2. 27 Nilai Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 pada 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah 162

Tabel 2. 28 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesalehan Sosial 163

Tabel 2. 29 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan..... 164

Tabel 2. 30 Perbandingan Jumlah Konflik Yang Ditangani..... 165

Tabel 2. 31 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi Dalam Kurun Waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir..... 165

Tabel 2. 32 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Budaya Yang Dilestarikan 167

Tabel 2. 33 Indikator Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan 167

Tabel 2. 34 Indikator Persentase Kesenian Yang Dikembangkan..... 168

Tabel 2. 35 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kondusivitas Wilayah Yang Dilestarikan 170

Tabel 2. 36 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Persentase Penegakan Perda 170

Tabel 2. 37 Rincian Perda-Perda Yang Ditegakkan 171

Tabel 2. 38 Realisasi dan Capaian Persentase Desa Tangguh Bencana 172

Tabel 2. 39 Persentase Desa Tangguh Bencana 172

Tabel 2. 40 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 175

Tabel 2. 41 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja 200

Tabel 3. 1	Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	219
Tabel 4. 1	Target Capaian SPM Pendidikan Tahun 2023.....	221
Tabel 4. 2	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.....	222
Tabel 4. 3	Dukungan Personel Penerpan SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2023	223
Tabel 4. 4	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	223
Tabel 4. 5	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Tahun 2023.....	223
Tabel 4. 6	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) Tahun 2023.....	224
Tabel 4. 7	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Tahun 2023.....	225
Tabel 4. 8	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	225
Tabel 4. 9	Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	226
Tabel 4. 10	Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	227
Tabel 4. 11	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	231
Tabel 4. 12	Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	233
Tabel 4. 13	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	233
Tabel 4. 14	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Tahun 2023	234
Tabel 4. 15	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin) Tahun 2023.....	235
Tabel 4. 16	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) Tahun 2023	236
Tabel 4. 17	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Balita) Tahun 2023.....	236
Tabel 4. 18	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar) Tahun 2023	237

Tabel 4. 19 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif) Tahun 2023 239

Tabel 4. 20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut) Tahun 2023..... 239

Tabel 4. 21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi) Tahun 2023 240

Tabel 4. 22 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus) Tahun 2023..... 241

Tabel 4. 23 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan ODGJ) Tahun 2023 242

Tabel 4. 24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) Tahun 2023..... 243

Tabel 4. 25 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV) Tahun 2023 244

Tabel 4. 26 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 244

Tabel 4. 27 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 246

Tabel 4. 28 Target Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023 247

Tabel 4. 29 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 250

Tabel 4. 30 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023 250

Tabel 4. 31 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 251

Tabel 4. 32 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari) Tahun 2023..... 251

Tabel 4. 33 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) Tahun 2023..... 252

Tabel 4. 34 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023 253

Tabel 4. 35 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023	254
Tabel 4. 36 Target Capaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	255
Tabel 4. 37 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	256
Tabel 4. 38 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	257
Tabel 4. 39 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	257
Tabel 4. 40 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten) Tahun 2023.....	258
Tabel 4. 41 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten)	259
Tabel 4. 42 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	259
Tabel 4. 43 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	260
Tabel 4. 44 Target Capaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023	261
Tabel 4. 45 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	265
Tabel 4. 46 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023	265
Tabel 4. 47 Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	266
Tabel 4. 48 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum) Tahun 2023	266
Tabel 4. 49 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana)	267
Tabel 4. 50 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana) Tahun 2023	269
Tabel 4. 51 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana) Tahun 2023	270

Tabel 4. 52 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) Tahun 2023 271

Tabel 4. 53 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023 272

Tabel 4. 54 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023 272

Tabel 4. 55 Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 274

Tabel 4. 56 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023 282

Tabel 4. 57 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen..... 282

Tabel 4. 58 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 283

Tabel 4. 59 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial) Tahun 2023 284

Tabel 4. 60 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial) Tahun 2023..... 286

Tabel 4. 61 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial) Tahun 2023 287

Tabel 4. 62 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) Tahun 2023..... 289

Tabel 4. 63 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten) Tahun 2023..... 291

Tabel 4. 64 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023 292

Tabel 4. 65 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023 293

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 2

Gambar 1. 2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen 3

Gambar 2. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan
Indonesia Tahun 2020 – 2023 51

Gambar 2. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen,
2025-2023 52

Gambar 2. 3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten
Kebumen 2015-2023 53

Gambar 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen, 2019-2023..... 55

Gambar 2. 5 PDRB per Kapita Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku 56

Gambar 2. 6 Realisasi IRB 2020-2022 136

Gambar 2. 7 Nilai IKM Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir 137

Gambar 2. 8 Perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen
tahun 2021 s.d. 2023 139

Gambar 2. 9 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d.
2023 140

Gambar 2. 10 Realisasi IPM 2021-2023 142

Gambar 2. 11 Realisasi Angka Harapan Hidup 2021-2023 143

Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jateng, dan
Kebumen 148

Gambar 2. 13 Ketimpangan Pendapatan Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun
Terakhir 151

Gambar 2. 14 Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi, dan Nasional 161

Gambar 2. 15 Perhitungan Efisiensi Anggaran 174

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen mendasari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023; dan
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

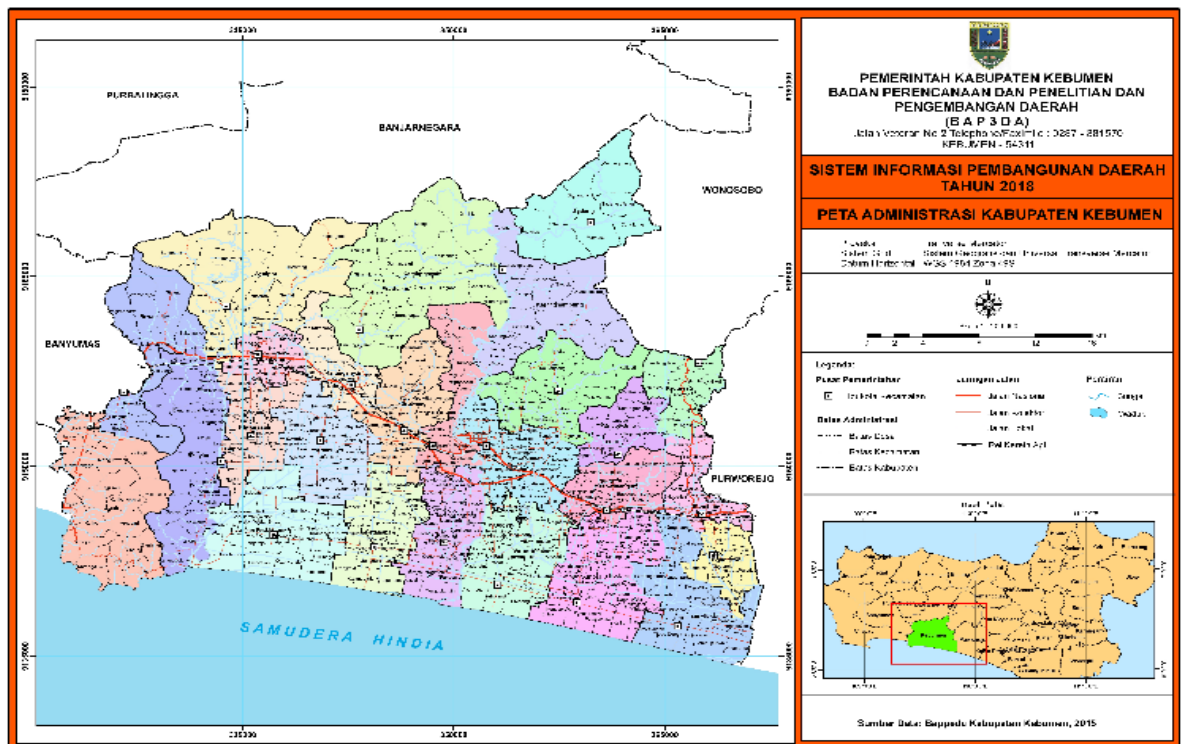
b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo

- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.



Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini :

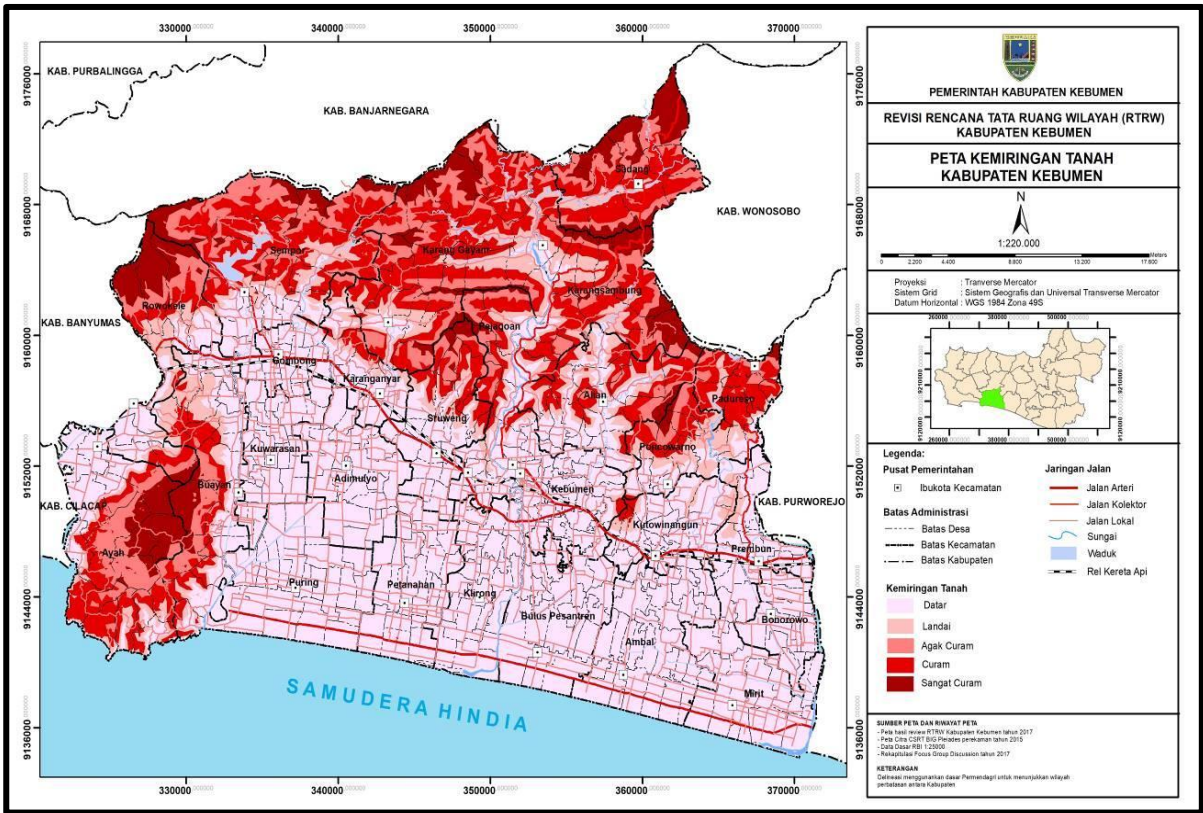
Tabel 1. 1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2023

Gambar 1. 2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m²/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumundal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Secara geologi wilayah Kabupaten Kebumen memiliki kondisi geologi yang sangat beragam. Kabupaten Kebumen tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen) terdiri dari:

1. Kompleks Melange Luk Ulo (KT1) yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);

2. Formasi Karangsambung (Teok) yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit;
3. Formasi Totogan (Tomt) yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo Miosen);
4. Anggota Tuf Formasi Waturanda (Tmwt) yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur Miosen Awal);
5. Formasi Waturanda (Tmw) yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf;
6. Formasi Penosogan (Tmp) yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batulempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah);
7. Diabas (Tmd) adalah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);
8. Formasi Halang (Tmph) yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);
9. Formasi Peniron (Tpp) yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
10. Batuan Gunungapi Sumbing Muda (Qsm) yang terdiri atas batupasir tufan, tuf pasiran dan breksi andesit;
11. Endapan Pantai (Qac) yang berupa pasir lepas; dan
12. Alluvium (Qa) yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

Klimatologi berhubungan dengan iklim yang merupakan rata-rata cuaca pada waktu yang lama dalam wilayah yang cukup luas. Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Perubahan iklim pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan yang yakni pada kegiatan budidaya pertanian dan lingkungan yang lebih luas. Kabupaten Kebumen memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup signifikan tinggi, bahkan selama bulan terkering. Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen tahun 2023 berkisar antara 24,94°C sampai dengan 27,76°C. Untuk kelembaban udara berkisar antara 77% sampai dengan 89%. Sedangkan jumlah curah hujan selama tahun 2023 sebesar 2.137 mm dan hari hujan sebanyak 130 hari. Keadaan suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 Keadaan suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Bulan	Temperatur (C)			Kelembaban Rata-rata (%)	Kecepatan Angin Rata-Rata (Knot)
	Min	Rata-Rata	Max		
Januari	18,20	26,65	33,40	86,00	33,22
Februari	17,80	25,45	28,80	79,00	26,24
Maret	18,40	27,41	35,20	84,00	34,52
April	18,80	26,61	35,00	87,00	31,40
Mei	17,60	27,76	34,80	87,00	43,21
Juni	18,00	26,18	34,60	86,00	50,58
Juli	15,40	25,57	32,00	89,00	54,44
Agustus	15,40	24,94	33,00	82,00	64,02
September	15,00	25,41	34,00	78,00	80,99
Oktober	16,00	27,75	35,40	77,00	68,64
Nopember	16,40	27,16	36,40	79,00	64,09
Desember	17,40	27,61	34,00	82,00	41,26

Sumber: Kabupaten Kebumen Dalam Angka, 2024

Kabupaten Kebumen memiliki kawasan Geopark Kebumen yang saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Geopark Kebumen secara administrasi berada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Geopark Kebumen dengan luas kawasan 1.160,6872 KM2 meliputi 22 kecamatan, 374 Desa dengan mempunyai morfologi yang bervariasi mulai dari perbukitan, lembah, pedataran sampai pantai. Terdapat 42 geosite 7 biosite dan 19 Culturesite yang berada dalam kawasan Geopark Kebumen yang perlu dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat, termasuk mengembangkannya sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Potensi pariwisata di Kabupaten Kebumen, khususnya dengan keberadaan Geopark Kebumen, hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tulang punggung perekonomian. Peningkatan ekonomi melalui upaya *value creation* area-area konservasi masih relatif minim dilakukan, meski potensi tersebut sangat besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten telah berupaya mendorong Kawasan Geopark Kebumen, selain ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada saat ini sedang dilakukan assesment menjadi Unesco Global Geopark (Geopark Internasional), juga dilakukan melalui dukungan RTRW Kabupaten Kebumen, dan juga kebijakan kepariwisataan di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov).

Berdasarkan Perpres 9/2019, Pengembangan Taman Bumi (Geopark) adalah tata kelola Geopark guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui tiga pilar pengembangan yakni konservasi, edukasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Mengusung visi **"Terwujudnya Kawasan Geopark Global Kebumen dengan Keragaman Geologi, Hayati, dan Budaya yang Berkelanjutan Demi Kesejahteraan Masyarakat"**, memandu upaya menuju pengembangan geopark yang tidak hanya memiliki nilai geologi, tetapi juga mengutamakan keseimbangan ekosistem, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep Geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.434.023 jiwa, tumbuh sebesar 1,7% dari tahun 2022. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 727.418 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 706.605 jiwa. Adapun secara terperinci jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin tahun 2023 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 4 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	33.05.01	AYAH	34,470	50.69%	33,537	49.31%	68,007	4.74%
2	33.05.02	BUAYAN	35,501	51.06%	34,027	48.94%	69,528	4.85%
3	33.05.03	PURING	33,861	50.65%	32,996	49.35%	66,857	4.66%
4	33.05.04	PETANAHAN	32,071	50.56%	31,362	49.44%	63,433	4.42%
5	33.05.05	KLIRONG	34,027	50.69%	33,102	49.31%	67,129	4.68%
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	31,499	50.90%	30,391	49.10%	61,890	4.32%
7	33.05.07	AMBAL	33,827	51.00%	32,500	49.00%	66,327	4.63%
8	33.05.08	MIRIT	28,614	50.84%	27,669	49.16%	56,283	3.92%
9	33.05.09	PREMBUN	15,154	50.25%	15,006	49.75%	30,160	2.10%
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	25,435	50.68%	24,754	49.32%	50,189	3.50%
11	33.05.11	ALIAN	36,065	50.99%	34,661	49.01%	70,726	4.93%
12	33.05.12	KEBUMEN	69,026	50.59%	67,420	49.41%	136,446	9.51%
13	33.05.13	PEJAGOAN	29,353	50.94%	28,274	49.06%	57,627	4.02%
14	33.05.14	SRUWENG	32,426	50.47%	31,820	49.53%	64,246	4.48%
15	33.05.15	ADIMULYO	19,519	49.98%	19,534	50.02%	39,053	2.72%
16	33.05.16	KUWARASAN	27,137	50.96%	26,115	49.04%	53,252	3.71%
17	33.05.17	ROWOKELE	27,229	50.58%	26,603	49.42%	53,832	3.75%
18	33.05.18	SEMPOR	36,993	50.77%	35,878	49.23%	72,871	5.08%
19	33.05.19	GOMBONG	25,277	49.85%	25,430	50.15%	50,707	3.54%
20	33.05.20	KARANGANYAR	19,457	50.46%	19,103	49.54%	38,560	2.69%
21	33.05.21	KARANGGAYAM	32,032	51.09%	30,668	48.91%	62,700	4.37%
22	33.05.22	SADANG	12,391	51.48%	11,677	48.52%	24,068	1.68%
23	33.05.23	BONOROWO	11,549	50.90%	11,142	49.10%	22,691	1.58%
24	33.05.24	PADURESO	8,855	50.72%	8,602	49.28%	17,457	1.22%
25	33.05.25	PONCOWARNO	10,008	51.00%	9,616	49.00%	19,624	1.37%
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	25,642	50.92%	24,718	49.08%	50,360	3.51%
Jumlah			727,418	50.73%	706,605	49.27%	1,434,023	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2023 berkisar pada angka 103. Nilai ini diartikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 103 penduduk laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1.6 menjelaskan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen yaitu sebanyak 136.446 jiwa, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan yaitu 9,51% berada di Kecamatan Kebumen Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso yaitu sebanyak 17.457 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui portal *gis.dukcapil.kemendagri.go.id* Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen per 30 Juni 2023 adalah 1.434.023 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 727.418 jiwa dan perempuan sebanyak 706.605 jiwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km².

Tabel 1. 5 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	294
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombang	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	449	11	1.930	7.127

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 15 (lima belas) Dinas, 5 (lima) Badan, dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	Sekretariat Daerah	79	61	140
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	17	41
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	4	21
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	3	18
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	53	23	76
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19	12	31
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	10	17
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	13	29

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	481	1.485	1.966
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	7	19
11	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	82	31	113
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34	15	49
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151	32	183
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	16	27
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	15	19
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.071	4.882	7.953
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	82	31	113
18	Dinas Pertanian dan Pangan	34	15	49
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	151	32	183
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	16	27
21	Dinas Tenaga Kerja	4	15	19
22	Inspektorat Daerah	29	25	54
23	Satuan Polisi Pamong Praja	34	6	40
24	Sekretariat DPRD	22	5	27
25	Kecamatan Adimulyo	10	7	17
26	Kecamatan Alian	13	3	16
27	Kecamatan Ambal	14	2	16
28	Kecamatan Ayah	12	6	18
29	Kecamatan Bonorowo	12	4	16
30	Kecamatan Buayan	9	3	12
31	Kecamatan Buluspesantren	10	6	16
32	Kecamatan Gombang	21	8	29

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
33	Kecamatan Karanganyar	28	14	42
34	Kecamatan Karanggayam	11	3	14
35	Kecamatan Karangsambung	11	9	20
36	Kecamatan Kebumen	30	19	49
37	Kecamatan Klirong	9	4	13
38	Kecamatan Kutowinangun	9	6	15
39	Kecamatan Kuwarasan	14	3	17
40	Kecamatan Mirit	11	6	17
41	Kecamatan Padureso	9	4	13
42	Kecamatan Pejagoan	14	3	17
43	Kecamatan Petanahan	9	7	16
44	Kecamatan Poncowarno	7	6	13
45	Kecamatan Prembun	10	7	17
46	Kecamatan Puring	11	4	15
47	Kecamatan Rowokele	10	5	15
48	Kecamatan Sadang	12	3	15
49	Kecamatan Sempor	11	6	17
50	Kecamatan Sruweng	12	4	16
	JUMLAH	4.977	6.866	11.843

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kebumen, 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penetapan kebijakan umum keuangan daerah meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan daerah ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Analisis berbagai objek penerimaan daerah dilakukan untuk memahami trend atau perilaku penerimaan selama kurun waktu tertentu. Sementara analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berikut ini disajikan tabel data tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Tabel 1. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*)

NO	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022 (Audited)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAI- AN (%)	REALISASI (Rp.)
	PENDAPATAN	2.856.981.438.000,00	2.901.129.535.425,00	101,55	2.847.196.017.404,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pajak Daerah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	103,15	129.843.875.322,00
	Retribusi Daerah	36.368.440.000,00	28.898.155.929,00	79,46	28.375.110.419,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	100,00	17.640.585.052,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.299.270.000,00	278.478.986.096,00	113,99	336.486.804.682,00
	JUMLAH (I)	432.821.047.000,00	463.723.188.215,00	107,14	512.346.375.475,00
2	PENDAPATAN TRANSFER				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.233.962.752.000,00	2.251.003.022.457,00	100,76	2.123.296.694.941,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	98,33	206.406.947.000,00
	JUMLAH (II)	2.421.983.808.000,00	2.435.886.237.648,00	100,57	2.329.703.641.941,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	69,84	5.145.999.988,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	JUMLAH (III)	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	69,84	5.145.999.988,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 1. 8 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	BELANJA OPERASI	2.124.708.998.900,00	2.021.024.011.832,00	95,12
1	Belanja Pegawai	1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	94,09
2	Belanja Barang dan Jasa	753.610.646.850,00	726.725.297.839,00	96,43
3	Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	92,56
4	Belanja Hibah	132.241.048.000,00	128.807.444.203,00	97,40
5	Belanja Bantuan Sosial	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	92,86
II	BELANJA MODAL	290.509.850.100,00	278.842.943.538,00	95,98
1	Belanja Modal Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	87,82
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.599.220.763,00	65.799.426.633,00	94,54
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	96,25
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	96,36
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	99,76
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000,00	427.050.311,00	34,56
1	Belanja Tidak Terduga	1.235.728.000,00	427.050.311,00	34,56
IV	BELANJA TRANSFER	677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	99,93
1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	99,64
2	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	99,93
BELANJA DAERAH		3.093.927.960.000,00	2.977.767.388.681,00	96,25

Tabel 1. 9 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	99,95
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	99,44
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	91,37
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	83,49
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	101,63

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu strategis permasalahan daerah merupakan permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 serta prioritas kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Isu strategis permasalahan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2023, antara lain:

1. Profesionalisme Aparatur
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
3. Pengembangan Perekonomian Daerah
4. Pembenahan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi
5. Peningkatan Kondusifitas Wilayah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan prioritas:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan
 - c. Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan
 - d. Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 - b. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
 - c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi;
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- c. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat"**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : Yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Mandiri : Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu

pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai

tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan;

3. Berakhlak : Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter;

4. Bersama Rakyat : Bersama Rakyat diterjemahkan sebagai peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan peran masyarakat dalam pembangunan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki (handarbeni).

Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 5 (lima) sasaran yaitu:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 difokuskan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD dan mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Secara garis besar fokus dan prioritas masing-masing program adalah sebagai berikut:

I. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan; dan
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan

- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - d) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - e) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - f) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
 - h) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pengembangan Perumahan;
 - b) Program Kawasan Permukiman;
 - c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b) Program Penanggulangan Bencana; dan
 - c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 6. Sosial
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pemberdayaan Sosial;
 - b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c) Program Rehabilitasi Sosial;
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e) Program Penanganan Bencana; dan
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1. Tenaga Kerja
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b) Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c) Program Hubungan Industrial.
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b) Program Perlindungan Perempuan;
- c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- f) Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- i) Program Pengelolaan Persampahan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pendaftaran Penduduk;
- b) Program Pencatatan Sipil; dan
- c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penataan Desa;
- b) Program Peningkatan Kerjasama Desa;

- c) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Pengendalian Penduduk;
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
 - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Perhubungan
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10. Komunikasi dan Informatika
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Informasi Dan Komunikasi Publik; dan
 - b) Program Aplikasi Informatika.
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - b) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dan perlindungan; dan
 - e) Program Pengembangan UMKM.
12. Penanaman Modal
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah
- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b) Program Promosi Penanaman Modal;
 - c) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
13. Kepemudaan dan Olahraga
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
14. Statistik
- Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik.

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah

- a) Program Pengembangan Kebudayaan; dan
- b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah

- a) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah

- a) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno; dan
- b) Program Pengelolaan Arsip.

III. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b) Program Pemasaran Pariwisata; dan
- c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e) Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
- f) Program Penyuluhan Pertanian.

4. Kehutanan

Urusan Kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

6. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c) Program Pengembangan Ekspor;
- d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
- e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

7. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
- c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

8. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c) Program Perekonomian Dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Program Kepegawaian Daerah; dan
 - b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Penelitian dan Pengembangan
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Fungsi Lainnya
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
 - d) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - f) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
 - g) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Rencana program pembangunan daerah tahun 2021-2026 merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka rencana program prioritas daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, telah dirumuskan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023.

Hal ini untuk lebih menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil Musrenbang dan RKPD Tahun 2023. Sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 1. 10 Progam dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			850.259.873.113
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			221.727.858.000
	Program Pengelolaan Pendidikan		221.727.858.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	123.092.759.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.913.321.000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.815.205.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.906.573.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			440.453.372.506
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		308.324.703.000
		Peningkatan Pelayanan BLUD	308.324.703.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		125.042.331.506
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	44.016.384.106
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.815.147.400
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.800.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		3.366.385.000
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.000.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kbpupaten/Kota	3.362.385.000
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		548.172.000
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		3.171.781.000
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.036.781.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			155.905.266.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		15.424.055.000
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	498.048.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.926.007.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		11.840.213.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.840.213.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		5.461.678.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.461.678.000
	Program Penataan Bangunan Gedung		4.300.007.000
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.300.007.000
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		10.088.638.000
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.088.638.000
	Program Penyelenggaraan Jalan		108.109.843.000
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	108.109.843.000
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		99.699.000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	32.027.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	67.672.000
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		581.133.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	313.816.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	91.848.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	113.217.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	62.252.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			10.478.916.000
	Program Pengembangan Perumahan		533.801.000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.036.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	502.765.000
	Program Kawasan Permukiman		2.138.286.000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.138.286.000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		-2.130.900.000
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.130.900.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)		9.937.729.000
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.937.729.000
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			16.564.713.027
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		7.832.835.027
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.112.619.500
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	710.215.527
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000.000
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		3.292.221.000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.240.525.000
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	21.776.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	29.920.000
	Program Penanggulangan Bencana		5.439.657.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	460.180.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.685.740.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.329.237.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	964.500.000
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			5.129.747.580
	Program Pemberdayaan Sosial		38.030.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	38.030.000
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		3.384.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.384.000
	Program Rehabilitasi Sosial		1.833.139.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.293.253.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	539.886.000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		3.240.994.580
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.240.994.580
	Program Penanganan Bencana		779.335.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	638.276.000
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	141.059.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		14.200.000
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.200.000
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			1.195.892.000
	Program Perencanaan Tenaga Kerja		50.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50.000.000
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		456.152.000
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	434.152.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja		532.464.000
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	278.285.000
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	254.179.000
	Program Hubungan Industrial		157.276.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	157.276.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			1.202.084.000
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		592.281.000
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	71.385.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	520.896.000
	Program Perlindungan Perempuan		141.840.000
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71.840.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		30.644.000
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.644.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		31.996.000
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.996.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		142.622.000
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	74.932.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	67.690.000
	Program Perlindungan Khusus Anak		262.701.000
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.201.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.500.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			1.892.084.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		40.000.000
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		662.381.000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	171.932.000
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	244.883.000
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	245.566.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		1.094.537.000
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.400.000
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.080.137.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		95.166.000
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	95.166.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			37.632.000
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		37.632.000
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.632.000
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			14.013.145.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		342.358.000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	342.358.000
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.263.719.400
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	380.836.000
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59.340.000
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	823.543.400
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		2.374.753.600
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.374.753.600
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		38.531.000
		Penyimpanan sementara Limbah B3	38.531.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		69.055.000
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.055.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		82.043.000
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.043.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		46.656.000
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.656.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		16.464.000
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.464.000
	Program Pengelolaan Persampahan		9.779.565.000
		Pengelolaan Sampah	9.779.565.000
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			3.082.977.682
	Program Pendaftaran Penduduk		1.889.168.682

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	969.102.682
		Penataan Pendaftaran Penduduk	903.266.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.800.000
	Program Pencatatan Sipil		224.153.000
		Pelayanan Pencatatan Sipil	212.953.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	11.200.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		969.656.000
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	53.600.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	916.056.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			4.826.606.000
	Program Penataan Desa		31.000.000
		Penyelenggaraan Penataan Desa	31.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa		1.871.496.000
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	1.871.496.000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		797.147.000
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	797.147.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		2.126.963.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.126.963.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			17.973.301.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		10.907.193.000
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.494.300.000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.688.637.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.464.648.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.259.608.000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		7.066.108.000
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	7.036.108.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	30.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			32.326.952.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)		32.326.952.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	29.414.758.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	131.897.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	229.773.000
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	640.515.000
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.738.960.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.683.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.366.000
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			8.402.968.000
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		5.341.843.000
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.341.843.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		3.061.125.000
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.370.383.000
		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	690.742.000
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			4.637.584.000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		20.000.000
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian		277.287.000
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.287.000
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		445.730.000
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	445.730.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)		1.836.560.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.836.560.000
	Program Pengembangan Umkm		2.058.007.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.058.007.000
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			1.005.191.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		74.900.000
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	31.900.000
	Program Promosi Penanaman Modal		223.983.000
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	223.983.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal		283.240.000
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	283.240.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		399.188.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399.188.000
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		23.880.000
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.880.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			18.396.061.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		553.801.000
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	553.801.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		17.236.330.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.968.431.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.958.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	538.941.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		605.930.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	605.930.000
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			83.500.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		83.500.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.500.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			174.000.000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		174.000.000
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	174.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			24.309.012.000
	Program Pengembangan Kebudayaan		4.139.238.000
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.977.000
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.013.261.000
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		20.169.774.000
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20.169.774.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			523.792.000
	Program Pembinaan Perpustakaan		504.874.000
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	410.355.000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.519.000
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		18.918.000
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	18.918.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			365.822.000
	Program Pengelolaan Arsip		365.822.000
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	290.274.000
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	25.148.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	50.400.000
Urusan Pemerintahan Pilihan			
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			6.381.784.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		2.852.649.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.941.999.000
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	783.418.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.816.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		3.092.215.000
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.666.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.064.549.000
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		53.456.000
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	53.456.000
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		383.464.000
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.182.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	320.282.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			5.551.509.000
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		3.100.585.000
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	203.683.000
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.821.902.000
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
	Program Pemasaran Pariwisata		2.390.924.000
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.390.924.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		60.000.000
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			32.510.904.053
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		15.149.436.000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.727.375.000
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	9.072.212.000
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	178.813.000
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	20.380.000
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.656.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		12.264.532.053
		Pengembangan Prasarana Pertanian	1.586.993.053
		Pembangunan Prasarana Pertanian	5.173.769.000
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.503.770.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		2.019.714.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	457.032.000
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	163.648.000
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.267.660.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	106.014.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	25.360.000
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		591.132.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	591.132.000
	Program Perizinan Usaha Pertanian		50.068.000
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.716.000
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000
	Program Penyuluhan Pertanian		2.436.022.000
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.436.022.000
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral			10.000.000
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		10.000.000
		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			12.570.517.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		11.213.696.000
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.257.407.000
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	956.289.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		218.227.000
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	114.544.000
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	103.683.000
	Program Pengembangan Ekspor		325.366.000
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.366.000
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		173.754.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	173.754.000
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		639.474.000
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	639.474.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			1.242.420.000
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		1.118.500.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.118.500.000
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		80.366.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	80.366.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		43.554.000
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	43.554.000
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			139.000.000
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		139.000.000
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.000.000
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			69.949.349.474
Sekretariat Daerah			52.924.517.474
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		27.806.272.474
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.689.952.474
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	545.650.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.351.930.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.180.919.000
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.147.194.000
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	883.645.000
		Penataan Organisasi	336.400.000
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	670.582.000
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		23.644.762.000
		Administrasi Tata Pemerintahan	1.303.210.000
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.875.295.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	441.277.000
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	24.980.000
	Program Perekonomian Dan Pembangunan		1.473.483.000
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	200.260.000
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	767.060.000
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	330.683.000
Sekretariat DPRD			17.024.832.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		17.024.832.000
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.372.867.200
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	640.000.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	108.320.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.151.519.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.331.098.000
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.000.000
		Fasilitasi Tugas DPRD	7.396.027.800
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
Perencanaan			1.833.302.000
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.196.614.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	738.837.000
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	157.596.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.181.000
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		636.688.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	255.142.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	250.758.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	130.788.000
Keuangan			676.969.144.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		670.130.139.000
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.013.554.000
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.366.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	551.366.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	667.939.853.000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.721.168.000
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.117.837.000
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000
Kepegawaian			2.080.283.000
	Program Kepegawaian Daerah		2.080.283.000
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000
		Mutasi dan Promosi ASN	735.000.000
		Pengembangan Kompetensi ASN	72.628.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.655.000
Pendidikan Dan Pelatihan			1.879.526.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.879.526.000
		Pengembangan Kompetensi Teknis	371.036.000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.508.490.000
Penelitian Dan Pengembangan			482.039.000
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		482.039.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	315.459.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	166.580.000
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			1.890.908.000
Inspektorat Daerah			1.890.908.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		1.216.908.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.012.560.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.348.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		674.000.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	27.000.000
		Pendampingan dan Asistensi	647.000.000
Unsur Kewilayahan			14.818.203.000
Kecamatan			14.818.203.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		1.600.993.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.600.993.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		401.891.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	401.891.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		4.331.363.000
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.331.363.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		8.483.956.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.483.956.000
Unsur Pemerintahan Umum			29.037.415.000
Kesatuan Bangsa Dan Politik			29.037.415.000
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		415.000.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		25.692.385.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2023
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	25.692.385.000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		237.341.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.341.000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		1.370.842.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.370.842.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		1.321.847.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.321.847.000

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 11 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian
		1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
	dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata
		1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa
		1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya
2.	Mewujudkan kondusitivitas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 7 (tujuh) Tujuan, 18 (delapan belas) Sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yaitu :

- a) Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran;
- b) Misi II terdapat 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran;
- c) Misi III terdapat 2 (dua) Tujuan, 6 (enam) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran;
- d) Misi IV terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran; dan
- e) Misi V terdapat 2 (dua) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran.

Tabel 1. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,00
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,45
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,70
5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,84
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,64
6	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,35
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100
7	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.657,88
8	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.578,40
9	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.316,85
10	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.414,73
11	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00
12	Berkurangnya pengangguran	Angka pengangguran	%	5,40-5,50
13	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	59,27
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,19
15	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik,	%	64,29

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
		Radikal dan Sumber Daya Ekonomi		
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	29,82
17	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100
18	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2023

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Dasar Hukum Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kebijakan Umum Daerah

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan

administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari semua pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program

penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan :

1. Integrasi SPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, yaitu :
 - 1) Perumusan permasalahan pembangunan ;
 - 2) Penentuan pagu indikatif program/kegiatan.
 - b. Dijadikan sebagai salah Satu Kriteria Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, kriteria sbb :
 - 1) Kesesuaian dengan Ranwal RKPD;
 - 2) Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat (SPM);
 - 3) Kontribusi pada pencapaian target prioritas Pemb. Kab/Kota
 - 4) Dukungan nilai tambah.
2. Integrasi SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Integrasi SPM dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah;
4. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah. Beberapa indikator yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah tersebut diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Capaian kinerja makro tersebut dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menghitung perubahan capaian indikator makro dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja makro tahun pelaporan dikurangi capaian kinerja makro tahun sebelumnya dibagi dengan capaian kinerja makro tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Berikut ini capaian indikator kinerja makro Kabupaten Kebumen tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Laju Kinerja 2023
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,29	71,88	0,828
2	Angka Kemiskinan	16,41	16,34	-0,427
3	Angka Pengangguran	5,92	5,11	-13,682
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,79	5,66	-2,245
5	Pendapatan Per-Kapita	23,63	25,59	8,295
6	Ketimpangan Pendapatan	0,354	0,333	-5,932

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen 2023

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

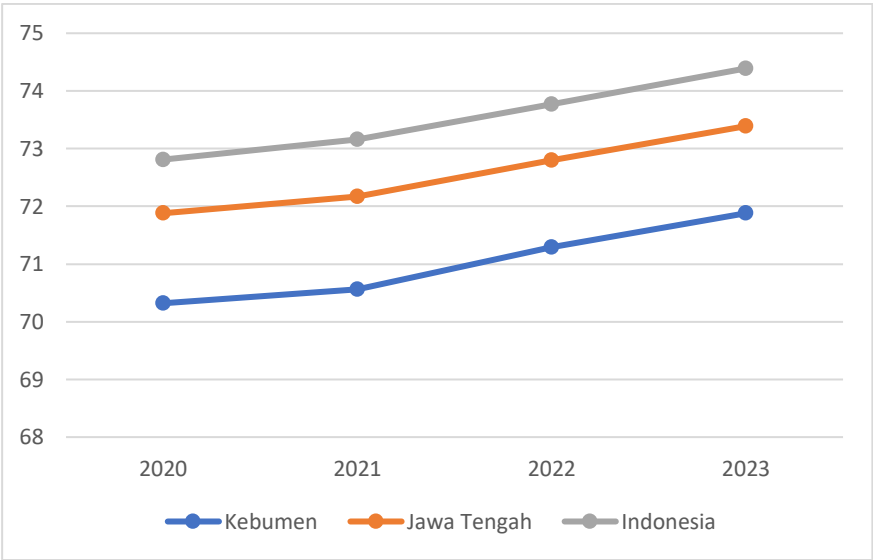
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 70,32, tahun 2021-2023 secara berturut turut

yaitu 70,56,71,29, dan 71,88. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama 4 tahun terakhir semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional UNPD (*United Nation Development Programme*), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi.

Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 4 tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Indonesia pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 73,39 dan 74,39. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 secara lengkap tersaji dalam gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik

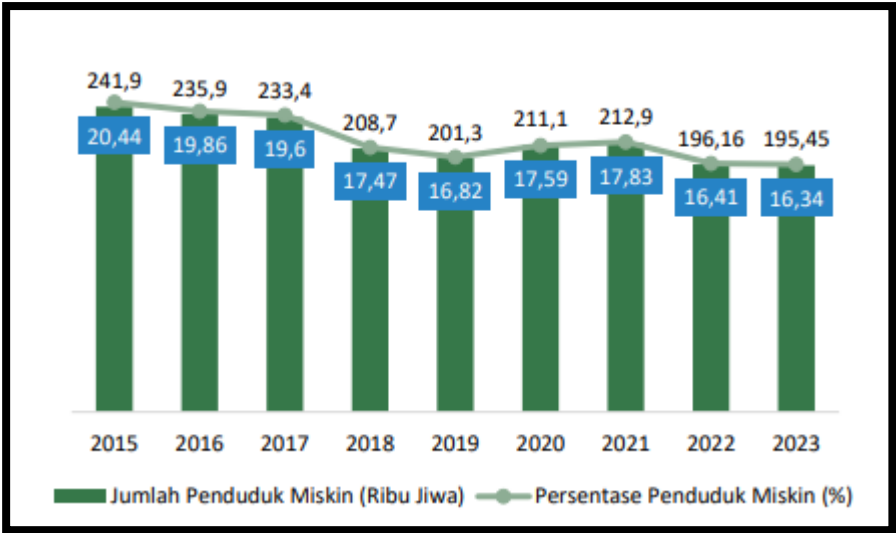
Gambar 2. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2020 – 2023

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita per tahun (yang disesuaikan).

B. Angka Kemiskinan

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk

miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya. Perkembangan kemiskinan Kabupaten Kebumen selama satu dekade terakhir dapat ditinjau melalui analisis tren tingkat kemiskinan. Analisis tren ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pengentasan kemiskinan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam analisis tren tersebut antara lain garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan), jumlah (ribu jiwa) dan persentase penduduk miskin, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabbupaten Kebumen, 2025-2023

Program pengentasan kemiskinan Kabupaten Kebumen selama hampir satu dekade terakhir sebenarnya relatif berhasil. Hal ini terlihat dari perkembangan tingkat kemiskinan selama 2015 – 2019 yang mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase (Grafik 2.2). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada 2015 sebanyak 241,9 ribu jiwa (20,44 persen), kemudian pada 2019 menurun menjadi 201,3 ribu jiwa (16,82 persen). Akan tetapi, pada 2020 dan 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Pada 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sebanyak 211,1 ribu jiwa (17,59 persen), kemudian pada 2021 bertambah menjadi 212,9 ribu jiwa (17,83 persen). Peningkatan ini secara tidak langsung merupakan imbas dari pandemi COVID-19. Penduduk miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Berbagai pembatasan mobilitas atau kegiatan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Penurunan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berbagai upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah mulai membuahkan hasil. Aktivitas-aktivitas sosial ekonomi kembali hidup dan berangsur normal. Keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi juga tampak dari penurunan tingkat kemiskinan di Kebumen, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 2023 jumlah penduduk miskin di Kebumen menurun menjadi 195,45 ribu jiwa atau 16,34 persen. Hal yang perlu diapresiasi adalah jumlah dan persentase penduduk miskin di Kebumen pada 2023 tercatat lebih rendah dari periode-periode sebelum pandemi.

Selanjutnya, untuk keperluan analisis kemiskinan yang lebih lanjut, maka diperlukan indikator lain seperti tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 3 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan
Kabupaten Kebumen 2015-2023

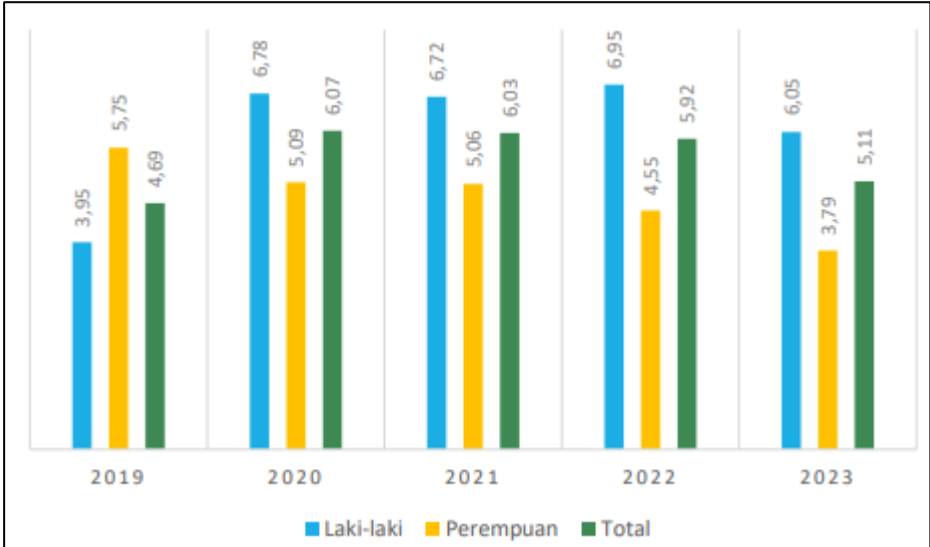
Grafik 2.3 menunjukkan bahwa selama periode 2015 – 2023, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan relatif berfluktuasi. Temuan yang menarik adalah selama periode 2018 – 2022, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan pada 2018 sebesar 2,48 dan terus meningkat menjadi 3,41 pada 2023. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan, walaupun pada 2020 sempat turun menjadi 0,55, tetapi pada 2022 indeks ini kembali meningkat menjadi 1,02. Kecenderungan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan selama periode 2018 – 2022 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan

garis kemiskinan cenderung semakin melebar dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 diduga juga semakin memperlebar kesenjangan tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang relatif tajam pada 2021 dan 2022. Namun demikian seiring dengan berakhirnya status pandemi pada 2023, Indeks Kedalaman dan Keparahannya kemiskinan di Kebumen cenderung menurun. Pada 2023, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kebumen tercatat sebesar 2,89 atau menurun 0,52 poin dibandingkan tahun 2022. Adapun Indeks Keparahannya kemiskinan di Kebumen sebesar 0,75 atau menurun 0,27 poin. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada 2023 juga memberikan gambaran bahwa kondisi masyarakat miskin di Kebumen cenderung semakin homogen

C. Tingkat Pengangguran

Dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, yakni ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Pada 2019 TPT Kebumen tercatat sebesar 4,69 persen. Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada awal 2020 secara tidak langsung menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan, TPT Kebumen pun naik menjadi 6,07 persen. Akan tetapi pada periode berikutnya, TPT Kebumen tercatat menurun, yakni menjadi 6,03 persen pada 2021 dan terus menurun menjadi 5,11 persen pada 2023. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Gambar 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen, 2019 – 2023

Penurunan TPT Kebumen selama 2020 – 2022 tidak lepas dari berbagai kebijakan penanganan dampak COVID-19, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam beberapa level dan Program Vaksinasi. Berbagai kebijakan ini telah membuahkan hasil. Perlahan kegiatan ekonomi mulai aktif kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini mendorong beberapa lapangan usaha membuka lapangan pekerjaan baru atau memanggil kembali pekerja yang dirumahkan sementara. Kondisi inilah yang secara tidak langsung berkontribusi menekan TPT Kebumen pada 2021 menjadi 6,03 persen dan terus menurun menjadi 5,11 persen pada 2023.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,79 persen menunjukkan bahwa Kebumen mengalami pertumbuhan yang relatif kuat pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang mungkin mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk investasi yang meningkat, peningkatan konsumsi rumah tangga, atau proyek pembangunan infrastruktur yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun sebelumnya biasanya menciptakan momentum positif untuk aktivitas ekonomi di tahun berikutnya.

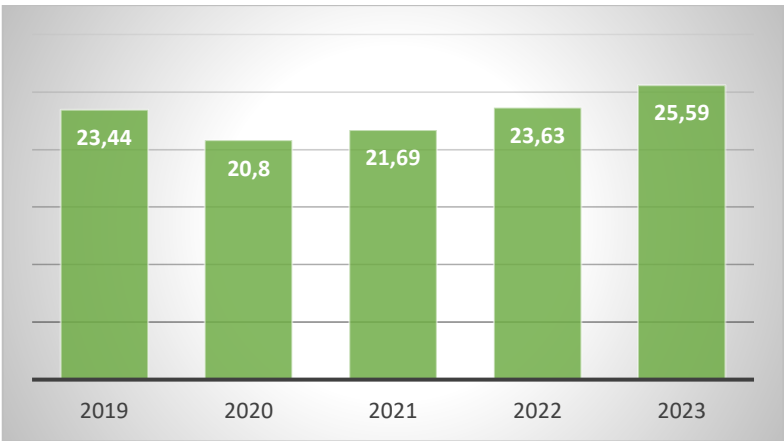
Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Kebumen tetap mengalami pertumbuhan walaupun melambat yakni sebesar 5,66 persen. Hal ini didorong oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi sebesar 0,50 persen, Lapangan usaha industry tumbuh melambat sebesar 6,31 persen, dan lapangan usaha jasa keuangan juga tumbuh melambat sebesar 1,53 persen. Walaupun demikian, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2023. Lapangan usaha pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 persen, lapangan usaha perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 5,75 persen, dan konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 9,89 persen.

E. PDRB Per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,44 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 25,59 juta rupiah (lihat Grafik 2.5). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 5 PDRB per Kapita Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Tahun 2019 – 2023

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan ukuran penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Di Kebumen, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 23,63 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 25,59 juta rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, pendapatan yang diterima oleh penduduk Kebumen meningkat dari tahun ke tahun dalam periode tersebut. Peningkatan PDRB per kapita dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan produktivitas, atau peningkatan dalam distribusi pendapatan.

Dengan PDRB per kapita yang meningkat, dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen juga meningkat seiring waktu. Namun, perlu diingat bahwa PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang sebenarnya di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

F. Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini rasio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Dengan data Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio Kebumen yang ada (0,354 untuk tahun 2022 dan 0,333 untuk tahun 2023), kita dapat mengevaluasi hubungannya dengan PDRB per kapita dan potensi dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan. Secara umum, penurunan Gini Ratio dari tahun 2022 ke 2023 (dari 0,354 menjadi 0,333) menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat Kebumen.

Meskipun kenaikan PDRB per kapita dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, penurunan Gini Rasio dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kebumen, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan di masyarakat. Namun, penting untuk terus memantau kedua indikator ini bersama-sama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan distribusi pendapatan yang merata dan inklusif.

Gini Rasio yang lebih rendah menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, yang berarti pendapatan lebih merata di antara penduduk. Dengan demikian, penurunan Gini Ratio dari tahun 2022 ke 2023 (0,354 menjadi 0,333) menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat Kebumen selama periode tersebut.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	1.248	Disdikpora	
		2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	33.424	Disdikpora	
		3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	33.424	Disdikpora	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	3.296	Disdikpora	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD	3.296	Disdikpora	
		6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.485	Disdikpora	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	645	Disdikpora	
	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	841	Disdikpora	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	101.318	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	43.077	Disdikpora	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	101.318	Disdikpora	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	43.077	Disdikpora	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.863	Disdikpora	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.172	Disdikpora	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.863	Disdikpora	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.172	Disdikpora	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	242	Disdikpora	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	714	Disdikpora	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	242	Disdikpora	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	714	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6.860	Disdikpora	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.442	Disdikpora	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	746	Disdikpora	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	117	Disdikpora	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	658	Disdikpora	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	584	Disdikpora	
	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	13	Disdikpora	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.520	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	2.520	Disdikpora	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	250	Disdikpora	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	250	Disdikpora	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	184	Disdikpora	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	746	Disdikpora	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	16	Disdikpora	
	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11	Dinkes PPKB	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	11	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16.289	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	840	Dinkes PPKB	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16.289	Dinkes PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.134	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16.259	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.147	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	74.028	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	800	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	186.457	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.302	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	533.922	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun sesuai standar	1.312	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	167.524	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan usia 60 tahun ke atas sesuai standar	1.312	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	58.291	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	1.312	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10.339	Dinkes PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan penderita DM sesuai standar	1.312	Dinkes PPKB	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4.426	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan ODGJ berat sesuai standar	72	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16.568	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan terduga TBC sesuai standar	588	Dinkes PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23.273	Dinkes PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV / deteksi dini HIV sesuai standar	602	Dinkes PPKB	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PU PR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PU PR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PU PR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU PR	
		6. Rencana eknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU PR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	Dinas PU PR	
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	78,71	Dinas PU PR	
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	35,5	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas PU PR	
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Bappeda	
		3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PU PR	
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	189	Dinas PU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	Disperkimhub	
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	745	Disperkimhub	
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	6.768	Disperkimhub	
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	355	Disperkimhub	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	355	Disperkimhub	
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	355	Disperkimhub	
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Disperkimhub	
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Disperkimhub	
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	22,34	Disperkimhub	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	5,77	Disperkimhub	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	66,66	Disperkimhub	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100	Disperkimhub	
		13. Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	22,34	Disperkimhub	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,39	Disperkimhub	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,016	Dinas PU PR	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting	189	Dinas PU PR	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada	Dinas PU PR	
		4. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada	Dinas PU PR	
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	4	Disdikpora	
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	0	Disdikpora	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas PU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	0	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.017,15 Km	Dinas PU PR	
		2. Panjang jalan yang dibangun	2,83 Km	Dinas PU PR	
		3. Panjang jembatan yang dibangun	34 m	Dinas PU PR	
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	10 Km	Dinas PU PR	
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	27 m	Dinas PU PR	
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	14,07 Km	Dinas PU PR	
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	15 m	Dinas PU PR	
		8. Panjang jalan yang dipelihara	21,42 Km	Dinas PU PR	
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	12 Km	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	73	Dinas PU PR	
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	73	Dinas PU PR	
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas PU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	1	Dinas PU PR	
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	0	Dinas PU PR	
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PU PR	
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1 dokumen	Dinas PU PR	
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas PU PR	
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang	73	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	DPMPTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	DPMPTSP	
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	12	DPUPR	
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPTSP	Sudah tidak ada IUJK dan TDUP. Saat ini sudah diganti dengan Sertifikat Standart yang menjadi Kewenangan Kementrian PUPR

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPMPTSP / Disnaker	
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	463	Bagian AP	
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	463	Bagian AP	
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPMPTSP	
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPMPTSP	
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	1.375	DPMPTSP	
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPTSP	
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	463	DPMPTSP / Bagian AP	
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR/ Bagian AP	
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	463	DPMPTSP / Bagian AP	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	11	Disperkimhub	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	11	Disperkimhub	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	11	Disperkimhub	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1	Disperkimhub	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Disperkimhub	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	10	Disperkimhub	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Disperkimhub	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	11	Disperkimhub	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	16.757 m ²	Disperkimhub	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Disperkimhub	
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Disperkimhub	
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Disperkimhub	
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan	6	Disperkimhub	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Disperkimhub	
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Disperkimhub	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	152,46	Disperkimhub	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.629	Disperkimhub	
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,16	Disperkimhub	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah di kab/kota	354.807	Disperkimhub	
		2. Jumlah unit PK RTLH	1.629	Disperkimhub	
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	23.266	Disperkimhub	
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Disperkimhub	
		5. Rasio rumah dan KK	1,31	Disperkimhub	
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	0	Disperkimhub	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	41	Disperkimhub	
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3.773	Disperkimhub	
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3.773	Disperkimhub	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3.773	Disperkimhub	
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Disperkimhub	
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Disperkimhub	
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Disperkimhub	
		8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Disperkimhub	
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Disperkimhub	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	16.796	Satpol PP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	12.422	Satpol PP	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	20	Satpol PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	9	Satpol PP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	961	Satpol PP	
			100	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenisancaman bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara ikut pelatihan	100	BPBD	
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	25,24	BPBD	
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBD	
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	711	Satpol PP	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4	Satpol PP	
		3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	32	Satpol PP	
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4	Satpol PP	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	227	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	77	Satpol PP	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	91	Satpol PP	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	77	Satpol PP	
.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	10	Dinas Sosial	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	Dinas Sosial	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas Sosial	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	410	Dinas Sosial	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	660	Dinas Sosial	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	370	Dinas Sosial	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	120	Dinas Sosial	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2	Dinas Sosial	
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	Dinas Sosial	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	100	Dinas Sosial	
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	Dinas Sosial	
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	342	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	100	Dinas Sosial	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	16	Dinas Sosial	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	5	Dinas Sosial	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	140	Dinas Sosial	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	8	Dinas Sosial	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	57	Dinas Sosial	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10	Dinas Sosial	
	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	480	Dinas Sosial	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	150	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
		4. Jumlah paket permukiman khusus bagi kelompok rentan	2	Dinas Sosial	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	150	Dinas Sosial	
		6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	342	Dinas Sosial	
	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	85	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	1	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	68,75	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8,85	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	5,77	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	19,2	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	100	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Persentase penyerapan lulusan	67,71	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	192	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	1,03	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	20,69	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	200	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	1.660	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	27,58	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5,75	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penutupan perusahaan	1	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah perselisihan PHK	5	Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	17	Dinas Tenaga Kerja	
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	15	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja	
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	4.375	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	12.367	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	66	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	18	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	505	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	12	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	140	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	2.426	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	3	Dinas Tenaga Kerja	
				Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	25	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	50	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1	Dinas Tenaga Kerja	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	50	DispermadesP3A	
		2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	35	DispermadesP3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	13	DispermadesP3A	
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DispermadesP3A	
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DispermadesP3A	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	474	DispermadesP3A	
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DispermadesP3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	32	DispermadesP3A	
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	40	DispermadesP3A	
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	475	DispermadesP3A	
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	DispermadesP3A	
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	DispermadesP3A	
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandisasi	1	DispermadesP3A	
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DispermadesP3A	
	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	103	Distapang	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	460	Distapang	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	1	Distapang	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	25	Distapang	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Distapang	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	4	Distapang	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	14	Distapang	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	215	Distapang	
	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DPMPSTSP	
		2. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	DPU PR	
		3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	DPU PR	
	Pertanahan	4. Dokumen Izin membuka tanah	0	DPMPSTSP	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	1	DPMPSTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	51,74	DLHKP	
		2. Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,41	DLHKP	
		3. Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	50,63	DLHKP	
	Lingkungan Hidup	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	30,28	DLHKP	
	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DLHKP	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,79	DLHKP	
		3. Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	DLHKP	
		4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLHKP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	100		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	100	Disdukcapil	
		2. Penerbitan akta perceraian	100	Disdukcapil	
		3. Penerbitan akta kematian	100	Disdukcapil	
		4. Penyajian data kependudukan	100	Disdukcapil	
	Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	449	Dinas PMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	232	Dinas PMD	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	449	Dinas PMD	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	174	Dinas PMD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	1	Dinkes PPKB	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,1	Dinkes PPKB	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	1.975	Dinkes PPKB	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	84,55	Dinkes PPKB	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	20	Dinkes PPKB	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Dinkes PPKB	
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	69,957	Dinkes PPKB	
		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0	Dinkes PPKB	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	39,24	Dinkes PPKB	
		1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	57,84	Dinkes PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pengendalian Penduduk dan KB	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	71,06	Dinkes PPKB	
	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100	Disperkimhub	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	1,4	Disperkimhub	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	Disperkimhub	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	47,62	Disperkimhub	
	Kominfo	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas Kominfo	
	Kominfo	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Kominfo	
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Kominfo	
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Kominfo	
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Kominfo	
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	54,08	Dinas Kominfo	
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Kominfo	
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Kominfo	
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Kominfo	
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Kominfo	
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	38	Dinas Kominfo	
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	
		14. Tersedianya peraturandaerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kominfo	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi	100	Dinas Kominfo	
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Kominfo	
		3. Persentase diseminasi dan layananinformasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Kominfo	
	KUKM	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,57	Disperindag KUKM	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	Disperindag KUKM	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	43,39	Disperindag KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14,56	Disperindag KUKM	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31,67	Disperindag KUKM	
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0,5	Disperindag KUKM	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,22	Disperindag KUKM	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	3,24	Disperindag KUKM	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90,52	Disperindag KUKM	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,24	Disperindag KUKM	
			12,72	Disperindag KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	49,13	Disperindag KUKM	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,99	Disperindag KUKM	
	KUKM	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	9,87	Disperindag KUKM	
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	85,37	Disperindag KUKM	
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,66	Disperindag KUKM	
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	62,21	Disperindag KUKM	
		5. Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	13,71	Disperindag KUKM	
			2,13	Disperindag KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan pemasaran			
		7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1	Disperindag KUKM	
	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	3	DPMPTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSP	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4	DPMPTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	5.263	DPMPTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	21.887	DPMPTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp.628.230.300. 587,-	DPMPTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	20	DPMPTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	21	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	4	DPMPTSP	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	90	Disdikpora	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	115	Disdikpora	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	71	Disdikpora	
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	263	Disdikpora	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40	Disdikpora	
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	11	Disdikpora	
	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Kominfo	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Kominfo	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Dinas Kominfo	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	Dinas Kominfo	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	Dinas Kominfo	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	Dinas Kominfo	
	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Kominfo	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Kominfo	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Kominfo	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	644	Disparbud	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	644	Disparbud	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	644	Disparbud	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	75	Disparbud	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	130	Disparbud	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	4	Disparbud	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disparbud	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1	Disparbud	
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	4	Disparbud	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kebudayaan	1. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disparbud	
		2. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Disparbud	
		3. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Disparbud	
		4. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Disparbud	
		5. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	Disparbud	
		6. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	Disparbud	
		7. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	50	Disparbud	
		8. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	50	Disparbud	
		9. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1	Disparbud	
		10. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disparbud	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,829	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	29,71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	31,54	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	16,37	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	8.679	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kelautan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	17	DLHKP	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	87,5	DLHKP	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	54	DLHKP	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	408	DLHKP	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	33.326.739	DLHKP	
	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	129	Disparbud	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1.931	Disparbud	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	702	Disparbud	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11	Disparbud	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	14	Disparbud	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Disparbud	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	55	Disparbud	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Disparbud	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	550	Disparbud	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	11	Disparbud	
	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan	551	Distapang	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	492	Distapang	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	377	Distapang	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	100	Distapang	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	100	Distapang	
	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	25,04	Distapang	
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah	0	DPMPTSP	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	32	Disperindag KUKM	
		2. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	440	Disperindag KUKM	
		3. Persentase penerbitan TDG	14	Disperindag KUKM	
		4. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	Disperindag KUKM	
		5. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Disperindag KUKM	
		6. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Disperindag KUKM	
		7. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Disperindag KUKM	
		8. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	4	Disperindag KUKM	
		9. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	30,77	Disperindag KUKM	
	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	23.659.600	Disperindag KUKM	
	Perdagangan	1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	87,38	Disperindag KUKM	
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Disperindag KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	100	Disperindag	
	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100	Disperindag	
	Perindustrian	1. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	73	Disperindag	
	Perindustrian	2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	100	Disperindag	
	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	100	Disperindag	
	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	3	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Dinas Tenaga Kerja	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pendidikan					
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	DISDIKPORA	
Kesehatan					
	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,99	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	DINKES PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	DINKES PPKB	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai (Pemecah Ombak) di WS Kewenangan Kab/Kota	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,71	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,19	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	5,29	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	73,96	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	58,66	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	DPU PR	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	1,39	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,55	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,09	DISPERKIMHUB	
Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,17	Satpol PP	
Sosial					
	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	100	DINSOS P3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
		pengemisi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	DINSOS P3A	
Tenaga Kerja					
	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	183.058,90676 8	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	20,68	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	35,21	DISNAKER	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	45,98	PMD	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,014	PMD	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,94	PMD	
Pangan					
	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	21,34	DISTAPANG	
Pertanahan					
	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	DPUPR	
	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	DPUPR	
	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	DPUPR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	DPUPR	
	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100	DPUPR	
	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	DPUPR	
Lingkungan Hidup					
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,16	DISPERKIMHUB	
	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	30,27	DISPERKIMHUB	
	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	DISPERKIMHUB	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	98,18	DISDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	57,017	DISDUKCAPIL	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	dan Pencatatan Sipil				
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,37	DISDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	66,67	DISDUKCAPIL	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	PMD	
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan status desa mandiri	42,96	PMD	
Keluarga Berencana					
	Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,975	DINKES PPKB	
	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	69,95	DINKES PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,65	DINKES PPKB	
Perhubungan					
	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,64	DISPERKIMHUB	
	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,39	DISPERKIMHUB	
Kominfo					
	Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	DISKOMINFO	
	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	51	DISKOMINFO	
	Kominfo	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	76,69	DISKOMINFO	
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	KUKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	48,19	DISNAKER	
	KUKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	99,87	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Penanaman Modal					
	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	11,26	DPMPTSP	
Pemuda dan Olahraga					
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,12	DISPARBUD	
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,124	DISPARBUD	
	Pemuda dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	14	DISPARBUD	
Statistik					
	statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	DISKOMINFO	
	statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	DISKOMINFO	
Persandian					
	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	78,45	DISKOMINFO	
Kebudayaan					
	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	76,15	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perpustakaan					
	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	54,31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	88,78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan					
	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	78,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan dan Perikanan					
	Kelautan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	129,126	DLHKP	
Pariwisata					
	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	22,22	DISPARBUD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	32,46	DISPARBUD	
	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	54,22	DISPARBUD	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,38	DISPARBUD	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,31	DISPARBUD	
Energi Sumber Daya Mineral					
	ESDM	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	0	PROVINSI	
Pertanian					
	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	565,92	DISTAPANG	
	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-0,25	DISTAPANG	
Perdagangan					
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	1,026	DISPERINDAG KUKM	
	Perdagangan	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	102,01	DISPERINDAG KUKM	
	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	87,37	DISPERINDAG KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perindustrian					
	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0,062	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	73	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (rumus adalah Keterkinian informasi industri + kelengkapan informasi industri) liat juknis	100	DISPERINDAG KUKM	
Transmigrasi					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Transmigrasi	Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	3	DISNAKER	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perencanaan dan Keuangan					
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	27,37	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	15,98	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,19	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures	63,16	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	7	BPKPD	
Pengadaan					
	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian pengadaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
				Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	92,96	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	21,88	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	66	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
Kepegawaian					
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75,55	BKPSDM	
	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,55	BKPSDM	
	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKPSDM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
Manajemen Keuangan					
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,65	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	7,20	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Assets Management	Ya	BPKPD	
			Ya	BPKPD	
			Ya	BPKPD	
			Ya	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,10	BPKPD	
Transparansi dan Partisipasi Publik					
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	DISKOMINFO	
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83,333	DISKOMINFO	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara IKD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKD dan IKU sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 2. 5 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 65 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Berikut kami sajikan rekapitulasi hasil pencapaian indikator sasaran IKU Kabupaten Kebumen :

Tabel 2. 6 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					BS	B	C	K
1	Misi 1	1	3	4	2	2		
2	Misi 2	1	3	5	2	3		
3	Misi 3	2	6	6	2	4		
4	Misi 4	1	2	2	1	1		
5	Misi 5	2	4	4	2	2		
	Jumlah	7	18	21	9	12		
Prosentase (%)					42,86%	57,14%		

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Hasil analisis bahwa dari 7 (tujuh) tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja/sasaran, diketahui bahwa 9 (sembilan) indikator sasaran atau 42,86% pencapaiannya dengan kriteria **Baik Sekali**, 12 (dua belas) indikator sasaran atau 57,14% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 113,35% atau bermakna **Baik Sekali**.

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 7 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,00
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,45
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,70
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,84
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,64
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,35
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.657,9
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.578,4
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.316,9
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.414,7
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00
12.	Berkurangnya pengangguran	Angka pengangguran	%	5,40-5,50
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	59,27
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,19
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	64,29
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	29,82
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100,00

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 8 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00	90,16	107,33
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,00	66,11	95,81
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	100
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,45	3,7	107,25
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,70	73,83	100,18
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,84	7,86	100,26
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,64	13,37	98,02
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,35	93,05	99,7
		Cakupan Perlindungan Anak		100,00	100,00	100,0
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.657,9	5.130,0	90,67
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.578,4	6.427,0	140,38
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.316,9	11.081,9	89,97
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.414,7	4.244,7	96,15
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00	16,34	97,88
12.	Berkurangnya pengangguran	Angka pengangguran	%	5,40-5,50	5,11	107,09

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	59,27	64	107,98
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,19	67,16	90,52
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	64,29	100,00	155,55
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	29,82	88,07	295,34
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100	100,00
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100,00	100	100,00
Rata-Rata						113,35

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2. 9 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	87,69	84,00	90,16	107,33
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,85	65,49	69,00	66,11	95,81
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,44	3,45	3,7	107,25
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,70	73,70	73,83	100,18
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,85	7,84	7,86	100,26
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,36	13,64	13,37	97,95
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,05	93,35	93,05	99,7
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100,00	100,00	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5,090,09	5.040,1	5.657,9	5.130,0	90,67
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	5.992,6	4.578,4	6.427,0	140,38
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,81	10.393,1	12.316,9	11.081,9	89,97
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.109,0	4.414,7	4.244,7	96,15
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,41	15,00-16,00	16,34	97,88
12.	Berkurangnya pengangguran	Angka pengangguran	%	6,03	5,92	5,40-5,50	5,11	107,09

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	55,34	59,27	64	107,98
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	64,43	74,19	67,16	90,62
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	64,29	100,00	155,55
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30,00	100	29,82	88,07	295,34
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100,00	100	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100,00	100	100

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2. 10 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
				2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	87,69	84,00	90,16	107,33	86	104,84
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,85	65,49	69,00	66,11	95,81	77	85,86
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,44	3,45	3,7	107,25	3,6	102,78
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,70	73,70	73,83	100,18	74	99,77
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,85	7,84	7,86	100,26	8,14	96,56
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,36	13,64	13,37	98,02	13,94	95,91
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,05	93,35	93,05	99,7	93,65	99,58
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100,00	100,00	100,0	100	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5,090,09	5.040,1	5.657,9	5.130,0	90,67	6.643,72	77,22
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	5.992,6	4.578,4	6.427,0	140,38	5.376,15	119,55
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,81	10.393,1	12.316,9	11.081,9	89,97	14.462,95	130,51
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.109,0	4.414,7	4.244,7	96,15	5.183,96	81,88
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,41	15,00-16,00	16,34	97,88	13,00-13,50	78,96
12.	Berkurangnya pengangguran	Angka pengangguran	%	6,03	5,92	5,40-5,50	5,11	107,09	5,10-5,20	101,73
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	55,34	59,27	64	107,98	70,69	78,29
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	64,43	74,19	67,16	90,52	74,45	90,21

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
				2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	64,29	100,00	155,55	78,57	127,28
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30,00	100	29,82	88,07	295,34	43,05	204,62
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100,00	100	100,00	100	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100,00	100	100,00	100	100

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

2.3.5 Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

A. Tujuan Pertama : Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik diukur dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan pertama sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

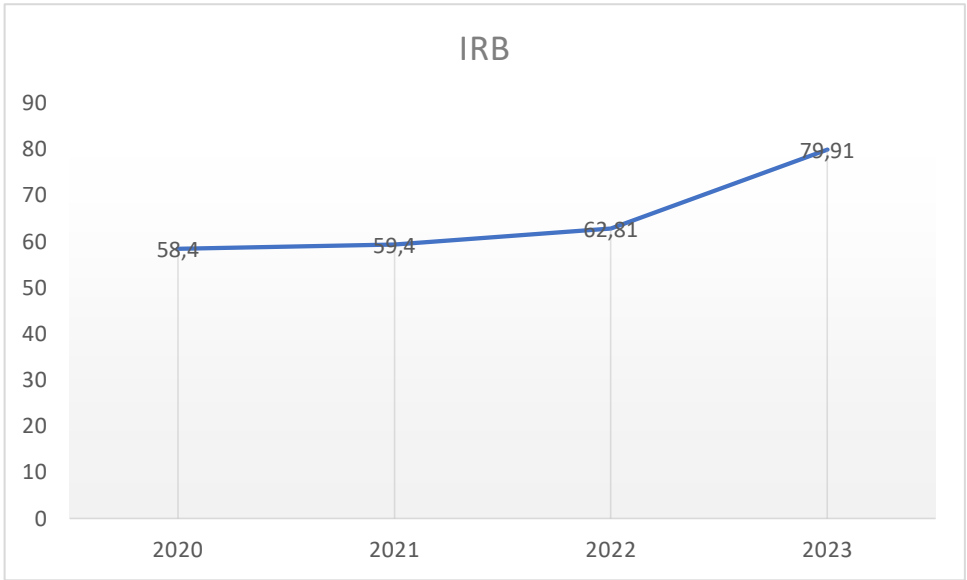
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62,81	63,33	79,91	126,18%	69,33	115,26%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 telah mencapai target dengan realisasi 79,91 dengan capaian kinerja 126,18 % atau kategori capaian Baik Sekali.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja IRB tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 115,26 %

Nilai IRB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 6 Realisasi IRB 2020-2022

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2023 lebih baik dari pada tahun sebelumnya, namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus ditindaklanjuti terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemkab Kebumen. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Penetapan rencana aksi oleh kepala daerah
2. Perbaikan rencana aksi yang mendukung pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi general maupun tematik.

Terhadap rekomendasi di atas **solusi atau rencana tindak lanjut** yang dapat dilaksanakan antarlain :

1. Koordinasi dan kompilasi rencana aksi dari perangkat daerah yang mendukung reformasi birokrasi general dan tematik
2. Fasilitasi penyusunan rencana aksi baik untuk kegiatan reformasi birokrasi genaral maupun tematik
3. Monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan rencana aksi.

Tujuan Pertama diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 dari Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), rumusan perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja IKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja IKM

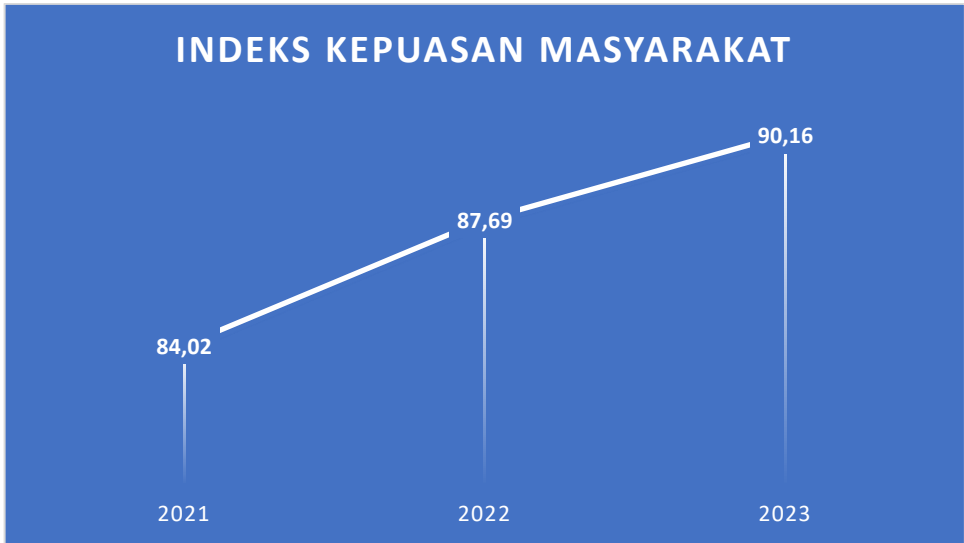
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,69	84,00	90,16	107,33%	86	104,84%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

IKM Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 90 ,16 dengan capaian kinerja 107,33 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja IKM tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 104,84 %

Nilai IKM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 7 Nilai IKM Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir

Nilai IKM telah mencapai target namun demikian masih ada 3 (tiga) unsur dari 9 (sembilan) Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang masih perlu perbaikan. Prioritas unsur pelayanan dan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Waktu Pelayanan

Perlu dilakukan publikasi waktu penyelenggaraan pelayanan publik oleh UPP baik melalui media elektronik (website, medsos, dll) maupun non elektronik (papan informasi, buklet, pamphlet, baliho, poster dll);

- b. Sarana dan Prasarana

Dilaksanakan analisis kebutuhan dalam pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik selanjutnya diproses melalui perencanaan penganggaran sesuai ketentuan; dan
- c. Prosedur

Melakukan monitoring dan evaluasi atas prosedur penyelenggaraan pelayanan publik (review dokumen standar operasional prosedur)
- b. Sasaran 2 dari Tujuan Pertama : Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB dan Opini BPK yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Realisasi dan capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13 Realisasi dan Capaian Kinerja Dari Sasaran Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel

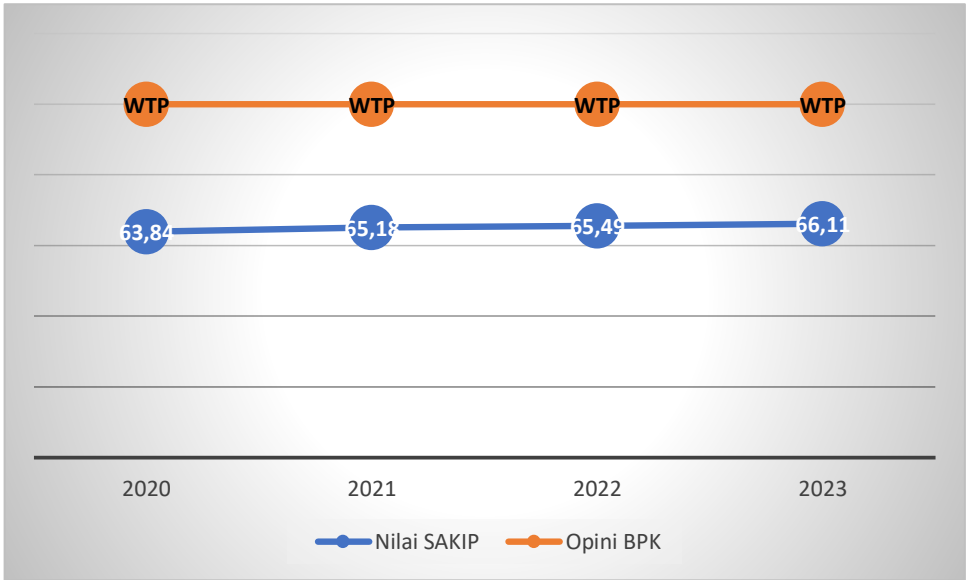
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Nilai SAKIP	65,49	69,00	66,11	95,81%	77	85,86%
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP dan Opini BPK telah mencapai target yang ditetapkan.

Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 95,81% atau kategori capaian Baik, sedangkan Opini BPK capain kinerjanya 100% atau kategori capaian Baik.

Adapun grafik perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 8 Perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023

Kendala dalam mencapai target Nilai SAKIP adalah adanya pejabat yang Pensiun/ Mutasi yang berdampak pada *Transfer knowledge* antar pejabat / pelaksana yang membidangi akuntabilitas kinerja belum maksimal, sehingga dalam pemenuhan dokumen SAKIP tidak lengkap maupun dalam Penyusunan laporan kinerja yang belum disertai analisis yang jelas.

Solusi atau rencana tindak lanjut kedepan guna mencapai target ditahun yang akan datang:

1. Fasilitasi desk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk perangkat daerah
2. Bimbingan Teknis Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi pejabat/ pelaksana perencanaan

Sementara itu beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai predikat WTP adalah keterbatasan kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta pengawasan dalam implementasinya dan belum seluruh aset/tanah pemda sudah bersertifikat. Oleh karenanya beberapa langkah tindak lanjut sangat diperlukan guna memastikan capaian WTP tersebut mampu dipertahankan, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan pendapatan daerah, dengan melalui program diklat dan pelatihan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pemahaman aparatur OPD dengan memberikan Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan BMD secara berkala;
3. Melaksanakan program pensertifikatan aset/tanah pemda secara bertahap; dan

4. meningkatkan sinergi dengan APIP Inspektorat daerah guna memastikan tata kelola keuangan Pemda berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Sasaran 3 dari Tujuan Pertama : Terwujudnya birokrasi yang kapabel
Terwujudnya birokrasi yang kapabel diukur dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementertian PAN dan RB.

Realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE

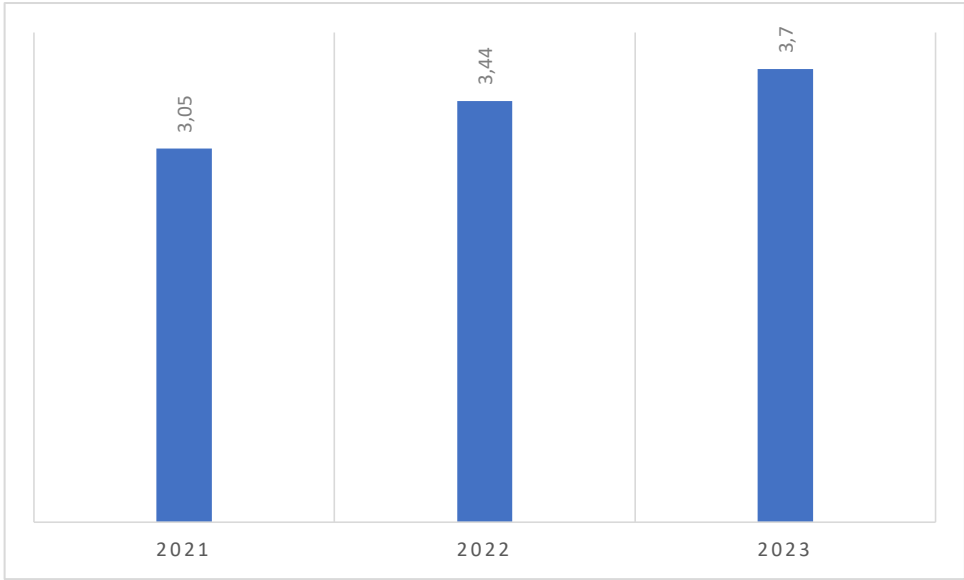
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks SPBE	3,44	3,45	3,70	107,25%	3,6	102,78%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks SPBE Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 3,70 dengan capaian kinerja 107,25 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks SPBE tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 102,78 %

Indeks SPBE dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 9 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023

Indeks SPBE tahun 2023 lebih baik dari pada tahun sebelumnya, namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus ditindaklanjuti terkait pelaksanaan SPBE.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kinerja capaian SPBE adalah belum lengkapnya pedoman formal untuk manajemen SPBE seperti pedoman manajemen risiko, manajemen asset TIK, kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK. Hal ini menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Solusi akan dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja adalah:

1. Pengembangan pedoman manajemen SPBE dapat merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Permenpan RB nomor 5 tahun 2020, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021, dan Permen PPN/Bappenas nomor 16,17,18 tahun 2020. Pedoman ini dapat menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan manajemen SPBE yang lebih optimal.
2. Perlu implementasi pedoman yang dikembangkan untuk seluruh Perangkat Daerah sehingga terjadi keseragaman dalam penerapan dan dalam pemenuhan indikator serta kriteria penilaian.

B. Tujuan Kedua : Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan kedua sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Tujuan Kedua

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,79	71,00	71,88	101,24%	72,5	99,14%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 71,88 dengan capaian kinerja 101,24 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja IPM tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 99,14 %.

Nilai IPM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 10 Realisasi IPM 2021-2023

Realisasi IPM tahun 2022 lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan Kedua diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 Tujuan Kedua : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan diukur dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan kedua sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Angka Harapan Hidup	73,7	73,70	73,83	100,18%	74	99,77%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 73,83 dengan capaian kinerja 100,14 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja AHH tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 99,77 %

Angka Harapan Hidup dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 11 Realisasi Angka Harapan Hidup 2021-2023

Realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2022 lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang akan datang adalah meningkatkan upaya kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat dengan integrasi paket pelayanan Kesehatan primer menurut kebutuhan siklus hidup.

Solusi atau rencana tindak lanjut yang akan datang antara lain:

- 1. Integrasi pelayanan primer.
- 2. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagai tolak ukur indikator derajat Kesehatan Masyarakat.
- 3. Meningkatkan pelayanan rujukan secara terintegrasi.

Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan kedua sebagai berikut:

- b. Sasaran 2 Tujuan Kedua : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan diukur dengan indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Realiasi dan capaian indikator kinerja Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 17 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,85	7,84	7,86	100,26%	8,14	96,56%
2	Harapan Lama Sekolah	13,36	13,64	13,37	98,02%	13,94	95,91%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019).

Realisasi Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2023 sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,86 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 7,84 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 7,86 tahun atau telah menamatkan/menyelesaikan kelas VII sehingga capaian kinerjanya 100,26 % atau kategori capaian **Baik Sekali**..

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Kurang Mampu (BKM). Selain itu, keberhasilan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk perusia 15 tahun keatas pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C bisa berjalan dengan baik.

Sedangkan Realisasi Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 capaian kinerja 98,02% atau kategori **Baik**, dari kondisi target Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 adalah 13,54 tahun dan realisasi capaiannya 13,37 tahun, yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,36 tahun atau setara dengan Diploma I.

Ketidaktercapaian target Harapan Lama Sekolah masih disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kemiskinan, tidak bersekolah diusia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (bekerja, mengikuti orangtua bekerja di luar Kebumen, kemauan bersekolah rendah), pernikahan dini, putus sekolah, dan usia sekolah berada di pondok pesantren tanpa mengikuti pendidikan formal/kesetaraan (SD/MI/SMP/MTs/sederajat).

Upaya untuk menjawab permasalahan antara lain:

1. Memfasilitasi Guru Tidak Tetap untuk dapat mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 2. Akselerasi pengusulan pengelola BMD dari sekolah;
 3. Penguatan kualitas 8 standar pendidikan;
 4. Beasiswa Kurang Mampu (BKM) bagi siswa kelas 6 SD/MI dan siswa kelas 9 SMP/MTs;
 5. Meningkatkan akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) minimal berakreditasi baik (B);
 6. Fasilitas kepada guru Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
 7. Meningkatkan kapasitas SDM guru dengan mengikutsertakan Pelatihan Profesi Guru (PPG) dan diklat sejenisnya;
 8. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Universitas Terbuka) untuk memberikan fasilitas kepada guru untuk dapat memenuhi kualifikasi pendidikan strata 1.
- c. Sasaran 3 Tujuan Kedua : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dan Cakupan Perlindungan Anak. Realiasi dan

capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA)

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Pembangunan Gender	93,05	93,35	93,26	99,90%	93,65	99,58%
2	Cakupan Perlindungan Anak	100	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Realisasi dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 93,26 atau dengan capaian 99,90 % atau kategori capaian **Baik**, sedangkan realisasi dari indikator kinerja Cakupan Perlindungan Anak telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi 100% atau dengan capaian 100% atau ketegori capaian **Baik**.

Permasalahan dalam upaya mencapai target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA) antaralain:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, Pengeluaran Per Kapita perempuan, angka partisipasi Perempuan dalam parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga masih rendah
2. Rendahnya daya saing tenaga kerja Perempuan dan budaya patriarki yang masih kental di masyarakat
3. Adanya fakta budaya (keengganan/malu/tidak ada keberanian) anak korban kekerasan untuk melapor.
4. Belum optimalnya peran KPAD (Kelompok Pelindungan Anak Desa) dalam pencegahan kasus kekerasan berbasis gender.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antarlain:

1. Peningkatan Gerakan Ayo Sekolah untuk mencegah Angka Putus Sekolah, pendidikan politik perempuan, sosialisasi PUG ke masyarakat lebih masif lagi.

- 2. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP).
- 3. Peningkatan kapasitas bagi KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di wilayahnya masing-masing.

C. Tujuan Ketiga : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah diukur dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi. Realiasi dan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 19 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

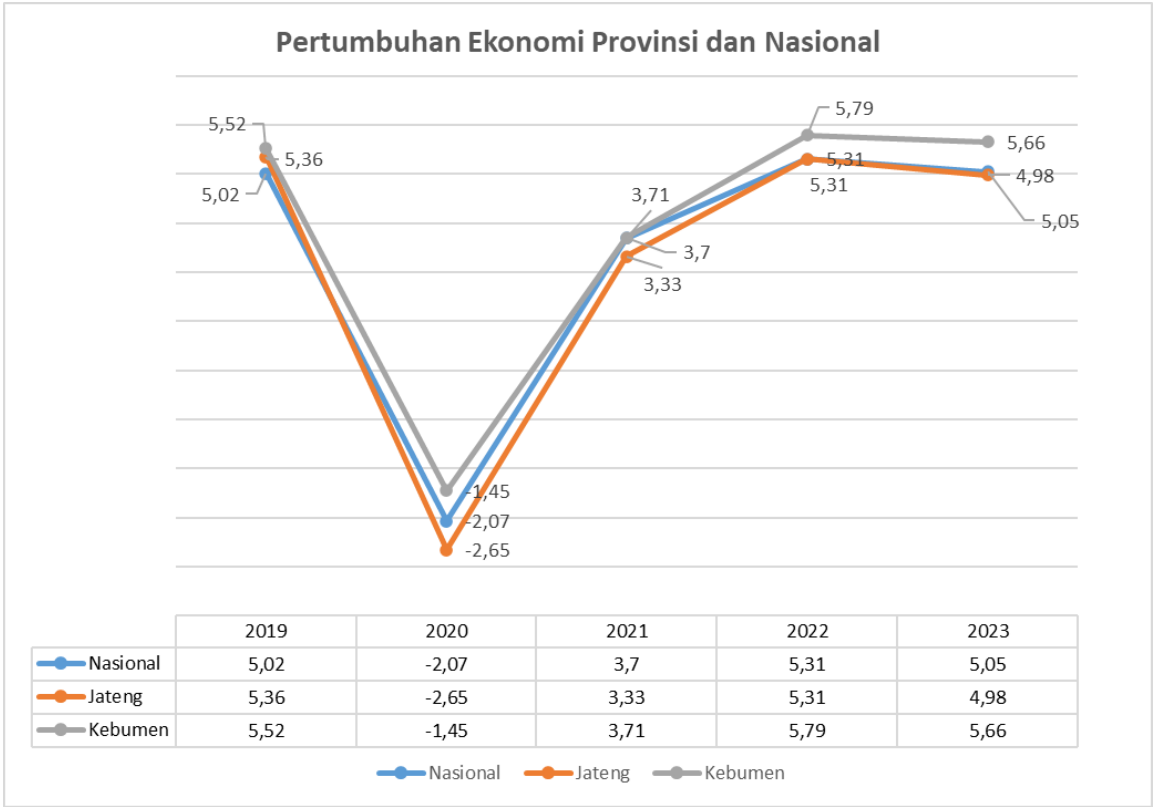
No	Indikator Tujuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,79	4,05-5,36	5,66	102,9%	5,00-5,50	102,91%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 5,66 dengan capaian kinerja 102,9% % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 lebih rendah dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 102,91 %.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Jateng dan Kebumen dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jateng, dan Kebumen

Pertumbuhan ekonomi Kab Kebumen 2019-2023 memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Jateng dan Nasional serta selalu tumbuh lebih tinggi dibanding Jateng dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kab Kebumen (5,66%) masuk dalam urutan ketiga tertinggi di Jawa Tengah setelah Kota Semarang (5,79%) dan Kabupaten Klaten (5,7%).

Tujuan ketiga diturunkan dan dibagi menjadi 4 (empat sasaran dan 4 indikator sasaran yang merupakan turunan dari pertumbuhan ekonomi antaralain:

- a. Sasaran 1 Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer
- b. Sasaran 2 Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder
- c. Sasaran 3 Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier
- d. Sasaran 4 Tujuan ketiga : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah

Capaian dari empat sasaran secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Capaian Dari Empat Sasaran

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	PDRB ADHK Sektor Primer	5.040,1	5.657,9	5.130,0	90,67%	6.643,72	77,22%
2	PDRB ADHK Sektor Sekunder	5.992,6	4.578,4	6.427,0	140,38%	5.376,15	119,55%
3	PDRB ADHK Sektor Tersier	10.393,1	12.316,9	11.081,9	89,97%	14.462,95	130,51%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	4.109,0	4.414,7	4.244,7	96,15%	5.183,96	81,88%

Sumber: LKjIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Sasaran dalam meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 5.130,0 atau dengan capaian 90,67% atau kategori capaian **Baik**. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, PDRB ADHK sektor primer yang didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,78%, sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan mengalami penurunan sebesar -0,52%.

Realisasi dalam meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder telah mencapai target dengan realisasi 6.427,0 dengan capaian kinerja 140,38% % atau kategori capaian **Baik Sekali**. Berdasarkan angka realisasi 2023, PDRB ADHK Sektor Sekunder mengalami pertumbuhan secara keseluruhan. Distribusi pada sektor sekunder masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 6,31% dari tahun 2022. Pada lapangan usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 9,89%.

Sasaran peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier tidak mencapai target yang ditetapkan dengan Realisasi 11.081,9 dengan capaian kinerja 89,97% atau kategori capaian **Baik**. Pada tahun 2023, secara keseluruhan PDRB ADHK sektor tersier mengalami pertumbuhan. Distribusi pada sektor tersier masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan sebesar 5,75% dari tahun 2022. Disusul oleh sektor Jasa Pendidikan yang tumbuh 4,59% dan Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 8,76% dari tahun 2022.

Sasaran dalam meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah tidak mencapai target dengan realisasi tahun 2023 sebesar 4.244,7 dengan capaian kinerja 96,15% atau kategori capaian **Baik**.

D. Tujuan Keempat : Meningkatkan pemerataan pembangunan

Meningkatkan pemerataan pembangunan diukur dengan indikator kinerja Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia). Realiasi dan capaian indikator kinerja Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 21 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Ketimpangan Pendapatan
(Ukuran Bank Dunia)

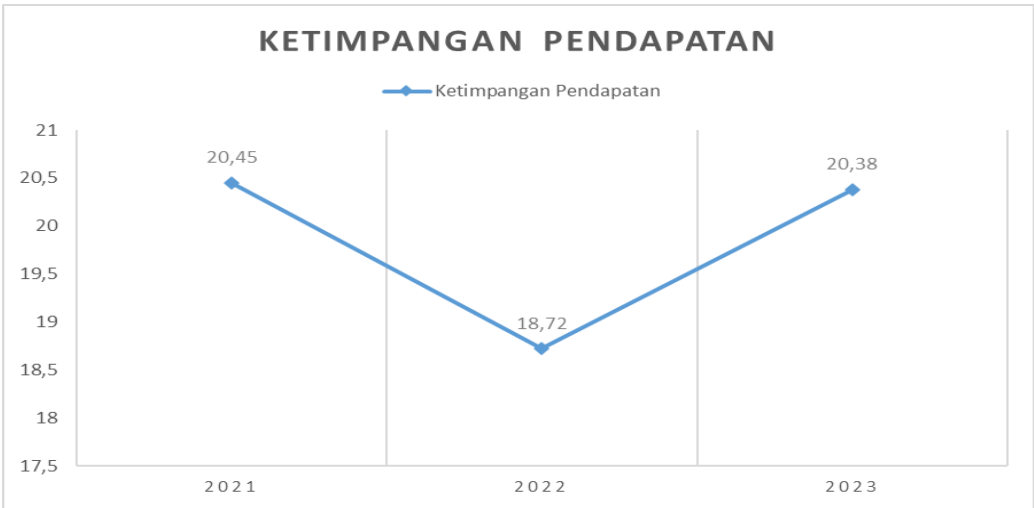
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	18,72	21,00	20,38	97,05%	22	92,64%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 20,38 dengan capaian kinerja 97,05 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja Ketimpangan Pendapatan tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 92,64 %.

Ketimpangan Pendapatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 13 Ketimpangan Pendapatan Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga)
Tahun Terakhir

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan.

1. 40% penduduk dengan pendapatan rendah,
2. 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan
3. 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan diukur dengan prosentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia Kabupaten Kebumen tahun 2023 yaitu 20,38 persen yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen tergolong rendah. Hal ini merujuk pada definisi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.

Permasalahan dalam upaya mencapai target Pertumbuhan Ekonomi antara lain:

1. Terjadi perlambatan pertumbuhan pada beberapa sektor PDRB, antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian, Transportasi pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Industri Pengolahan serta sektor Jasa Lainnya.
2. Masih relative rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, yang belum mampu kembali pada kondisi sebelum pandemi Covid 19, walaupun saat ini telah menunjukkan trend yang meningkat

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang adalah dengan mendorong beberapa sektor yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kab. Kebumen antara lain adalah :

1. Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas melalui peningkatan produktifitas pertanian antara lain dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan sarana prasarana, fasilitasi alsintan, benih dan pupuk, pengembangan kelembagaan pertanian, perbaikan teknologi penanganan pasca panen, mendorong investasi , riset dan pengembangan di sektor pertanian.
2. Mendorong pertumbuhan sektor industry pengolahan melalui upaya peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelaku usaha, pengembangan kelembagaan, perluasan pemasaran, penguatan riset dan pengembangan serta penajaman hilirisasi hasil pertanian dalam arti luas
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang akan mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor transportasi dan akomodasi makan dan minum serta jasa lainnya, melalui upaya peningkatan kapasitas SDM pariwisata, pengembangan sarana prasarana pariwisata, pengembangan kelembagaan, mendorong investasi, riset dan pengembangan pariwisata, peningkatan jejaring dan kerjasama dengan berbagai stakeholder serta peningkatan daya tarik wisata.

4. Memperluas akses ke layanan keuangan untuk mendorong inklusi keuangan dan memfasilitasi investasi serta pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
- Tujuan keempat diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran sebagai berikut:
- a. Sasaran 1 Tujuan keempat : Berkurangnya penduduk miskin

Sasaran Berkurangnya penduduk miskin diukur dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan. Realiasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 22 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Tingkat Kemiskinan	16,41	16,00-17,00	16,34	97,9%	13,00-13,50	78,96%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan (16-17) dengan realisasi 16,36 dengan capaian kinerja 97,9 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Tingkat Kemiskinan tahun 2023 lebih rendah 0,07 dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 78,96 %

Permasalahan dalam upaya mencapai target Tingkat Kemiskinan antara lain:

1. Tidak ada perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kurang fleksibel untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas *By Name By Address* (BNBA)
3. Masih didapati Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga menghambat tahap intervensi, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu syarat menerima bantuan sosial
4. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus ditetapkan *By Name By Address* (BNBA) satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru yang sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera harus menunggu anggaran perubahan

5. Banyaknya Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar (PGOT) dan ODGJ terlantar sementara di Kebumen masih terbatas dalam melaksanakan pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah
6. Belum optimalnya akses kesempatan kerja
7. Rendahnya akses infrastruktur dasar
8. Pengendalian inflasi untuk menjaga garis kemiskinan perlu dimaksimalkan.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain:

1. Melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui *entry* NIK satu persatu di aplikasi dan melaksanakan verval Data Terpadu Jawa Tengah (Provinsi) yang didalamnya terdapat variabel-variabel untuk perangkungan status kesejahteraan sosial
2. Melaksanakan verval ketidaklayakan untuk menonaktifkan Program Bansos bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu, meninggal dan pindah
3. Mencarikan bantuan dari sumber lain yang bisa diakses secara cepat, seperti: berkoordinasi dengan Sentra Satria Baturraden dan BAZNAS
4. Mengoptimalkan tugas pendamping SDM PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang sudah ada dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait
5. Berkoordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti sosial milik Provinsi
6. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Rumah Singgah
7. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
8. Memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan di dalam dan di luar daerah Kabupaten Kebumen
9. Memaksimalkan pencapaian akses infrastuktur dasar bagi penduduk miskin perlu terus dilakukan.
10. Komoditas pembentuk garis kemiskinan baik makanan dan bukan makanan inflasinya perlu dijaga.

b. Sasaran 2 Tujuan keempat : Berkurangnya pengangguran

Sasaran Berkurangnya pengangguran diukur dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Realiasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,92	5,40-5,50	5,11	107,09%	5,2	101,73%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 5,11 dengan capaian kinerja 107,09 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 101,73 %.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian kinerja antaralain:

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, meningkatnya penempatan tenaga kerja
2. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja dengan kebijakan yang diarahkan pada: Peningkatan pelayanan kinerja dan Keuangan, Peningkatan penyebarluasan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Terdapat inovasi-inovasi baru yang dibuat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. Inovasi tersebut diantaranya adalah Inovasi dalam Pelayanan Antar Kerja dengan Patriot (Pelayanan AK-1, Karier, Pelatihan dengan info loker kewilayah), Inovasi Si Pemikat (Sinergi Pelindungan PMI, Keluarga dan Masyarakat).
4. Keluarga dan Masyarakat, Pemerintah desa dan stakeholder dalam bekerja keluar negeri), Inovasi Gayatri (Gerbang Layanan Terpadu PMI LTSA) memudahkan akses layanan keluar negeri melalui layanan terpadu satu atap)

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain:

1. Kondisi pencari kerja setiap Tahun Rata-rata diatas 11.00 orang, sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak angka tersebut sehingga disparitas antara jumlah lowongan kerja yang harus disediakan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja akan menyebabkan banyak pencari tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Era Revolusi Industri modern berdampak positif dan negative kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan, Era tersebut memang memunculkan jenis jabatan/pekerjaan baru namun juga menghilangkan jenis/pekerjaan lama yang sudah ada.
3. Teknologi Informasi sangat berpengaruh terhadap proses produksi di perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia menjadi dilakukan secara Komputerisasi. Oleh karena itu Pencari Kerja juga harus respon terhadap perkembangan zaman.
4. Rendahnya minat bekerja di daerah sendiri dikarenakan UMK rendah
5. Adanya Informasi lowongan pekerjaan baik dalam dan luar negeri lewat media sosial yang kurang dapat dipertanggung jawabkan.
6. Terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk Calon transmigrasi Kabupaten.
7. Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah.
8. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi
9. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran.

Rencana tindak lanjut yang akan datang untuk mempertahankan kinerja antara lain:

1. Bersinergi dengan Sekolah dan Universitas dalam Upaya mendorong transformasi/paradigma dalam era sekarang dengan upaya memberikan pemahaman tentang Ketenagakerjaan melalui Rapat Koordinasi dengan sasaran Kepala SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang nanti diimplementasikan dalam kurikulum yang bisa link dengan dunia kerja.
 2. Memaksimalkan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/SMA/MA serta *Career Development Center* (CDC) yang ada di Perguruan Tinggi sebagai upaya agar dapat bekerja.
 3. Intervensi Pencari Kerja dengan kegiatan mini Job Fair, Job Canvassing (mencari lowongan kerja dan memasarkan tenaga kerja kepada perusahaan serta layanan karir bergerak
 4. Fasilitasi Rekrut Tenaga Kerja oleh Perusahaan Di Dinas Tenaga Kerja
 5. Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri
 6. Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri ke Pencari Kerja dan Masyarakat
- Era Revolusi Industri modern berdampak positif dan negatif kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan. Perlindungan secara komprehensif pada Pekerja Migran Indonesia baik yang Calon PMI maupun PMI purna penempatan

E. Tujuan Kelima : Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 24 Realiasi dan Capaian Indikator kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	59,19	63,75	64,97	101,91%	71,82	90,46%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 64,97 dengan capaian kinerja 101,91 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90,46 %

Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibagi menjadi dua sasaran sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 Tujuan kelima : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 25 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	55,34	59,27	64,00	107,98%	70,69	90,54%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah pada Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 64 dengan capaian kinerja 107,98 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90,54 %

Permasalahan dalam upaya mencapai target Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah antara lain:

1. Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum teridentifikasi dan tertangani oleh pemerintah daerah
2. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni.
3. Masih adanya kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani.
4. Akses sanitasi masyarakat masih rendah meliputi pengolahan limbah domestik, sampah dan drainase
5. Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih perlu ditingkatkan terutama penerangan jalan umum, traffic light, warning lamp, rambu, marka, guard rail sehingga masih sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda
6. Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan jalan dan mengakibatkan umur efektif jalan yang berkurang lebih cepat
7. Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan

8. Kurang optimalnya fungsi drainase dengan masih ditemukan genangan air dan daerah rawan banjir
9. Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau
10. Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen
11. Adanya alih fungsi sawah irigasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor pendorong dalam upaya mencapai target Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah antara lain:

1. Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Bantuan dari CSR dan swadaya masyarakat dalam pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. Alokasi DAK Penugasan penanganan sanitasi untuk pembangunan tangki septik individu di desa dengan prevalensi tinggi.
4. Bantuan hibah perlengkapan jalan dari pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah
5. Alokasi DAK Pembangunan SPAM. Serta alokasi bantuan provinsi jalan untuk Pembangunan jalan.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antar lain:

1. Melakukan updating data rumah secara periodik melalui aplikasi SIRUMAH
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah di tingkat pusat/provinsi, BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah (BAZNAS/Komunitas dll) untuk bersinergi dalam menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya menangani kawasan kumuh sesuai dengan kewenangannya.
4. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menyediakan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
5. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

- 6. Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan
- 7. Mendorong Masyarakat untuk melakukan skema kegiatan SPAM antar desa sangat membantu Masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum
- 8. Mengoptimalkan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan, jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada
- 9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Sasaran 2 Tujuan kelima : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 26 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

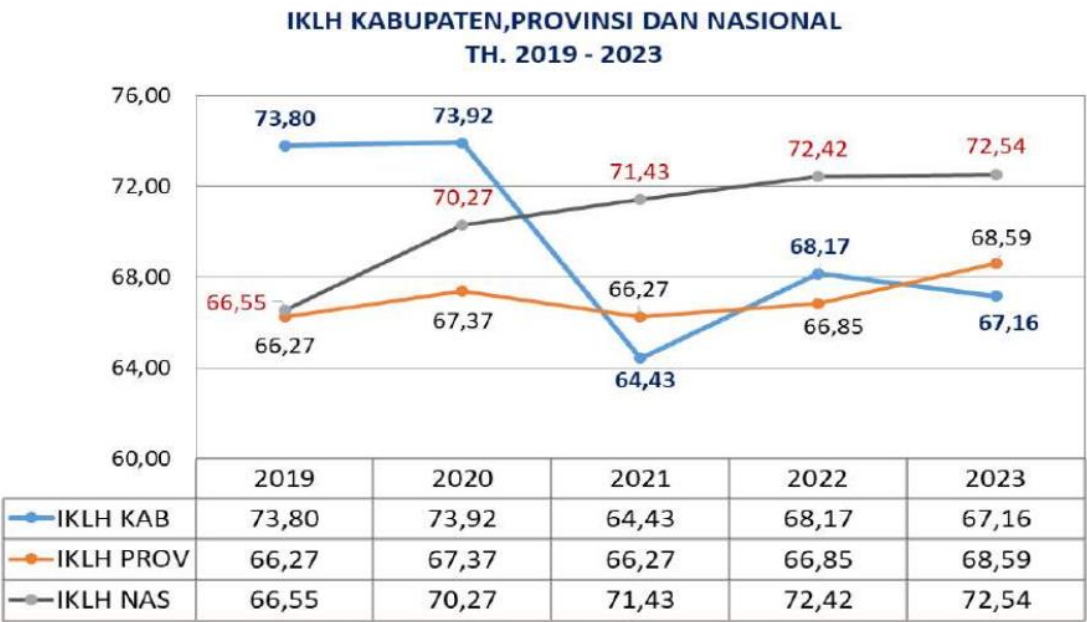
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,43	74,19	67,16	90,52%	74,45	90,21%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 67,16 dengan capaian kinerja 90,52 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90,21 %.

Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Gambar 2. 14 Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

Tahun 2023 capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Nasional dan IKLH Provinsi yaitu sebesar 67,16 dan masih termasuk kategori **“SEDANG”**. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan metode laporan IKLH sejak tahun 2021 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi online dari Kementerian LHK. Dari hasil pengujian tahun 2023 melalui aplikasi online tersebut terdapat penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Penurunan nilai IKA paling signifikan pada tahun 2023 karena dari hasil input data yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dari total 118 data hanya 76 data yang terverifikasi yang berasal dari data waduk/embung karena kurangnya parameter pokok IKA yakni kecerahan, klorofil, dan total nitrogen. Adanya musim kemarau panjang akibat *El Nino* dan jumlah kegiatan yang menjadi sumber pencemar semakin banyak menyebabkan nilai IKA turun.

Luasan tutupan lahan masih belum selesai input dalam aplikasi IKLH dan sebagian besar tidak terverifikasi karena kurangnya peta yang terbaru, keterbatasan waktu, sumber daya manusia dan anggaran untuk pembaharuan/inventarisasi tutupan lahan dan RTH Kabupaten Kebumen untuk kepentingan perhitungan IKLH yang update setiap tahunnya.

Selain itu adanya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada level nasional dan provinsi sedangkan kabupaten/kota tidak ada komponen IKAL dalam perhitungan IKLH sehingga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain masih relevan namun jika dibandingkan dengan IKLH Provinsi dan Nasional menjadi tidak relevan. Selain itu, yaitu adanya perbedaan target IKLH setiap Kabupaten/Kota yang sangat tergantung reraturan daerah masing-masing dalam menentukan target IKLH, sehingga terdapat dua jenis capaian yaitu capaian terhadap Target

IKLH dan Capaian IKLH itu sendiri yang keduanya memiliki kategori atau rentang masing-masing. Berikut ditampilkan daftar capaian IKLH seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Tabel 2. 27 Nilai Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 pada 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Kabupaten Banjarnegara	42,68	89,36	42,39	61,52	SEDANG
2	Kabupaten Banyumas	51,79	87,45	47,59	65,31	SEDANG
3	Kabupaten Batang	41,67	85,72	45	60,24	SEDANG
4	Kabupaten Blora	58	88,05	64,65	71,62	BAIK
5	Kabupaten Boyolali	50	82,55	41,82	61,39	SEDANG
6	Kabupaten Brebes	50,43	86	49,08	64,54	SEDANG
7	Kabupaten Cilacap	48,95	92,45	44,82	65,66	SEDANG
8	Kabupaten Demak	66,6	84,43	26,78	65,1	SEDANG
9	Kabupaten Grobogan	51,05	86,87	58,16	67,12	SEDANG
10	Kabupaten Jepara	32	85,54	43,8	56,27	SEDANG
11	Kabupaten Karanganyar	53,68	84,37	52,85	65,93	SEDANG
12	Kabupaten Kebumen	51,74	90,41	50,63	67,16	SEDANG
13	Kabupaten Kendal	44,29	79,56	40,52	57,75	SEDANG
14	Kabupaten Klaten	58,46	88,16	26,56	63,5	SEDANG
15	Kabupaten Tegal	58,82	88,33	40,68	66,8	SEDANG
16	Kabupaten Kudus	52,67	81,92	35,72	60,8	SEDANG
17	Kabupaten Magelang	54,07	89,55	42,01	65,8	SEDANG
18	Kabupaten Pati	50	82,9	37,67	60,63	SEDANG
19	Kabupaten Pekalongan	33,64	83,98	58,28	59,42	SEDANG
20	Kabupaten Pemalang	53,33	85,49	52,4	66,15	SEDANG
21	Kabupaten Purbalingga	56,67	88,7	44,04	66,87	SEDANG
22	Kabupaten Purworejo	47,89	88,74	63,31	67,81	SEDANG
23	Kabupaten Rembang	54,29	88,37	47,11	66,52	SEDANG
24	Kabupaten Semarang	50	86,1	52,03	65,07	SEDANG
25	Kabupaten Sragen	50,74	89,84	43,1	64,91	SEDANG
26	Kabupaten Sukoharjo	52,86	87,32	31,95	62,24	SEDANG
27	Kabupaten Temanggung	64,07	85,1	48,9	69,27	SEDANG
28	Kabupaten Wonogiri	55,45	88,33	36,67	64,66	SEDANG
29	Kabupaten Wonosobo	52,5	88,6	47,92	66,12	SEDANG
30	Kota Magelang	66,67	83,05	27,85	64,8	SEDANG
31	Kota Pekalongan	48,86	80,33	24,39	56,24	SEDANG
32	Kota Salatiga	44,29	84,84	33,62	58,38	SEDANG
33	Kota Semarang	46	80,55	31,63	56,84	SEDANG
34	Kota Surakarta	50	91,08	31,78	62,65	SEDANG
35	Kota Tegal	51,11	88,12	34,58	62,48	SEDANG

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 67,16 dengan rincian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 51,74; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,41; dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 50,63. Meskipun capaian tersebut belum mampu mencapai angka target yang sudah ditentukan, akan

tetapi jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada kabupaten/kota lain se-Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen mendapat **peringkat ke-4 (keempat) terbaik** setelah Kabupaten Blora (71,62), Kabupaten Temanggung (69,27), dan Kabupaten Purworejo (67,81).

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain:

1. Mengidentifikasi sumber pencemar air, baik dari usaha dan/atau kegiatan domestik (perumahan dan permukiman), industri (skala mikro kecil menengah), dan jasa (rumah sakit, perkantoran, dan lainnya) untuk kemudian dilakukan upaya pengendalian berupa sosialisasi pencegahan pencemaran, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pembuatan dan pemasangan papan informasi peringatan pada lokasi-lokasi yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) laboratorium lingkungan melalui pelatihan / sertifikasi keahlian pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Menambah titik-titik lokasi pemantauan air dan udara sehingga lebih menggambarkan kondisi (representatif) Kabupaten Kebumen.
4. Menginventarisasi ruang terbuka hijau (RTH) baik publik maupun privat di seluruh Kabupaten Kebumen.
5. Mengaktifkan kembali program *Car Free Day* (CFD) dan gerakan sejenisnya

F. Tujuan Keenam : Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat

Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 28 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesalehan Sosial

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kesalehan Sosial	80,36	77,00-77,50	82,16	106,0%	80,00-80,50	102,06%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Kesalehan Sosial pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 82,16 dengan capaian kinerja 106 % atau kategori capaian **Sangat Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kesalehan Sosial tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 102,06 %

Tantangan mempertahankan capaian kinerja kedepan perubahan perkembangan dan suhu politik/ pemilu, informasi dan hoaks dari medsos yg dapat mempengaruhi perilaku Kesalehan Sosial warga masyarakat kebumen.

Sedangkan upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan senantiasa sosialisasi kondusivitas sosial kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta seluruh stakeholder yang ada di Pemerintah Kabupaten Kebumen

Tujuan keenam diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis yakni:

- a. Sasaran 1 Tujuan keenam : Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan

Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan diukur dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi. Realisasi dan capaian indikator kinerja Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 29 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100	64,29	100,00	155,55%	78,57	127,28%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi pada Tahun 2023 telah mencapai target

dengan realisasi 100 dengan capaian kinerja 155,55 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 127,28 %

Rumusan Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi didapat dari Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Ditangani (JKD) dibagi Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Terjadi (JKT) dikalikan 100%.

Secara rinci perbandingan jumlah konflik yang ditangani sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Perbandingan Jumlah Konflik Yang Ditangani

Tahun	Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Terjadi	Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Ditangani
2020	0	0
2021	5	5
2022	40	40
2023	106	106

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 31 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi Dalam Kurun Waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir

Indikator Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	2021	57,14 %	100%	175,01%
	2022	60,71%	100%	164,72%
	2023	64,29	100,00	155,55%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Keberhasilan indikator Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi didukung oleh:

1. Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sehingga setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani.
2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini serta Pusat Komunikasi dan Informasi yang melibatkan berbagai unsur intelejen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini serta penanganan konflik .
3. Sinergitas antar Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.
4. Adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaran Bangsa Indonesia (FPBI) dalam memfasilitasi solidaritas antar umat beragama, toleransi, memperkuat kerukunan diantara elemen masyarakat, serta membangun moderasi beragama dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial.
5. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman berpolitik yang bermartabat.
6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Pemilu Damai 2024.

Upaya mempertahankan target kinerja yang akan datang dengan membangun jejaring dan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder dan elemen Masyarakat.

b. Sasaran 2 Tujuan keenam : Meningkatnya pembangunan kebudayaan

Meningkatnya pembangunan kebudayaan diukur dengan indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Budaya Yang Dilestarikan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase budaya yang dilestarikan	100	29,82	88,07	295,34%	43,04	204,62%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Persentase budaya yang dilestarikan pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 88,07 dengan capaian kinerja 295,34 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Rumusan Persentase Budaya yang dilestarikan adalah persentase kesenian yang dikembangkan ditambah persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi 2 (dua). Sehingga realisasi dari pencapaian Indikator kinerja Persentase Budaya yang dilestarikan secara rinci masing-masing sub indikator sebagai berikut:

Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan, dengan Rumus : jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 33 Indikator Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Tahun	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata	Capaian %
2020	20	91	21,98
2021	0	91	0
2022	35	130	26,92
2023	99	130	76,15

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indikator persentase kesenian yang dikembangkan, dengan rumus:
Jumlah kebudayaan /jumlah kegiatan x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Indikator Persentase Kesenian Yang Dikembangkan

Tahun	Jumlah kebudayaan	Jumlah kegiatan	Capaian %
2020	2	5	40,00
2021	3	5	60,00
2022	3	7	42,86
2023	33	33	100

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan telah menjadi fokus utama dalam upaya memelihara dan mempromosikan kekayaan budaya. Sejalan dengan pencapaian sasaran strategis, beberapa keberhasilan, kegagalan, dan solusi telah teridentifikasi.

Faktor Keberhasilan dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Penetapan Destinasi Budaya:
 - Keberhasilan: Identifikasi dan penetapan destinasi budaya baru berhasil menambahkan variasi dan kedalaman kekayaan budaya dalam destinasi pariwisata.
 - Analisis: Proses ini berhasil meningkatkan daya tarik destinasi, mengundang minat wisatawan untuk menjelajahi aspek budaya yang unik dan autentik.
2. Pemeliharaan Situs Bersejarah:
 - Keberhasilan: Investasi dalam pemeliharaan situs bersejarah membawa dampak positif pada kondisi dan daya tarik situs-situs tersebut.
 - Analisis: Peningkatan ini memastikan bahwa warisan budaya yang penting tetap terjaga dengan baik, memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi wisatawan.
3. Peningkatan Kesadaran Wisatawan:
 - Keberhasilan: Program edukasi budaya berhasil meningkatkan pemahaman wisatawan tentang sejarah dan tradisi lokal.
 - Analisis: Wisatawan yang lebih teredukasi cenderung menghargai dan menghormati warisan budaya, menciptakan interaksi yang lebih positif antara wisatawan dan komunitas setempat.

Tantangan mencapai target kinerja:

1. Kurangnya Partisipasi Komunitas Lokal:

- Kegagalan: Tidak mencapai tingkat partisipasi yang diharapkan dari komunitas lokal dalam program pemeliharaan budaya.
- Analisis: Kurangnya keterlibatan komunitas lokal dapat mengurangi keberlanjutan upaya pemeliharaan budaya. Masyarakat setempat perlu lebih diajak berpartisipasi dalam keputusan dan implementasi program.

2. Ketidakseimbangan Pendanaan:

- Kegagalan: Terdapat ketidakseimbangan dalam alokasi pendanaan untuk pemeliharaan situs bersejarah dan program edukasi budaya.
- Analisis: Prioritas yang tidak seimbang dapat mengakibatkan penelantaran beberapa aspek budaya yang mungkin memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan.

Solusi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang:

1. Penguatan Kolaborasi dengan Komunitas Lokal:

- Solusi: Meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan komunitas lokal melalui dialog terbuka, pelibatan aktif, dan pembentukan kemitraan yang inklusif.

2. Pengaturan Pendanaan yang Lebih Seimbang:

- Solusi: Mengevaluasi dan mengatur ulang alokasi pendanaan untuk memastikan adanya keseimbangan antara pemeliharaan situs bersejarah dan program edukasi budaya.

3. Meningkatkan Kampanye Edukasi Wisatawan:

- Solusi: Mengintensifkan kampanye edukasi budaya kepada masyarakat/wisatawan melalui berbagai media untuk meningkatkan pemahaman dan menghormati kekayaan budaya lokal.

G. Tujuan Ketujuh : Mewujudkan kondusitivitas wilayah

Mewujudkan kondusitivitas wilayah diukur dengan indikator kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah. Realisasi dan capaian indikator Indeks Kondusivitas Wilayah yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 35 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kondusivitas Wilayah Yang Dilestarikan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kondusivitas Wilayah	100	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Kondusivitas Wilayah pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah tahun 2023 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %

Perhitungan Indeks Kondusivitas Wilayah diperoleh dari persentase penegakan peraturan daerah ditambah persentase desa tangguh bencana dibagi dua. Secara terperinci permasalahan dan solusi mencapai target dijelaskan pada dua sasaran strategis berikut:

- a. Sasaran 1 Tujuan ketujuh : Meningkatnya ketertiban masyarakat
- Mewujudkan kondusivitas wilayah diukur dengan indikator kinerja Persentase Penegakan Perda. Realisasi dan capaian indikator Indeks Persentase Penegakan Perda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Persentase Penegakan Perda

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Penegakan Perda	100	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Sumber: LKJIP Bagian Organisasi Tahun 2023

Indeks Kondusivitas Wilayah pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah tahun 2023 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %

Dengan rincian jumlah capaian penegakan perda dan perkada yang ditegakan pada Tahun 2023 ini pada tabel berikut :

Tabel 2. 37 Rincian Perda-Perda Yang Ditegakkan

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1.	Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7 pelanggar	-
2.	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	16.747	
2.1	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	178 orang	Dari 18 tempat hotel/kost/hunian
2.2	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	17 orang	1924 botol miras
2.3	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7 tempat	Tempat Hiburan malam
2.4	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	43 pelajar	Operasi pelajar
2.5	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	6 toko	2875 botol tanpa ijin edar
2.6	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	212 orang	ODGJ, anak jalanan, dan PGOT
2.7	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	15.827 buah reklame	Penertiban reklame (Spanduk, Banner, bendera, baliho)
2.8	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	457 PKL	Penertiban PKL
3.	Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	42	-
Jumlah		16.796	Kasus

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Dari banyaknya kasus yang sudah ditangani sebagian besar diselesaikan dengan surat teguran dan pembinaan pada pelanggar yang melanggar disaat proses penegakan perda dan perkada, sedangkan proses sidang yang dijalankan sejumlah 30 orang terdakwa dengan pelanggaran perda nomor 4 Tahun 2020 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Upaya untuk mempertahankan capaian kinerja adalah :

1. Berkoordinasi dengan OPD terkait (pengampu) untuk meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi Perda

- 2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan Perda
- 3. Membangun jejaring dengan stakeholder dalam kegiatan penegakan Perda

b. Sasaran 2 Tujuan Ketujuh : Terwujudnya wilayah tangguh bencana

Terwujudnya wilayah tangguh bencana diukur dengan indikator kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana. Realisasi dan capaian Persentase Desa Tangguh Bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 38 Realisasi dan Capaian Persentase Desa Tangguh Bencana

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Persentase Desa Tangguh Bencana pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana tahun 2023 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %.

Persentase Desa Tangguh Bencana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 39 Persentase Desa Tangguh Bencana

Tahun	Jumlah desa tangguh bencana	Jumlah Desa	Capaian %
2020	70	70	100,00
2021	390	390	100,00
2022	60	60	100,00
2023	30	30	100,00

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa di kabupaten kebumen serta peningkatan kapasitas Destana yang telah dilaksanakan sudah

sesuai target yang direncanakan namun masih mengalami permasalahan antara lain:

1. Belum siapnya sumber daya manusia untuk mendukung program Desa Tangguh Bencana, masih ada masyarakat yang memiliki kesibukan lainnya sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan yang bersangkutan berhalangan hadir;
2. Keterbatasan anggaran sehingga program Desa Tangguh bencana tidak sampai dengan penyediaan sarana dan prasaranya;
3. Kualitas Desa Tangguh belum tercermin dalam pelaksanaan penanggulangan bencana oleh desa, masih tingginya ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten/ BPBD

Solusi atau upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Meningkatkan program/kegiatan sosialisasi dan pelatihan destana yang telah dilakukan dengan menambah unsur-unsur perwakilan masyarakat serta lebih banyak mengembangkan fasilitator Desa Tangguh Bencana dari Desa;
2. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana dengan menyesuaikan kondisi kerawanan bencana pada masing masing desa di Kabupaten Kebumen;
3. Mendorong Desa Tangguh Bencana yang ada untuk saling kerjasama sehingga pada saat terjadi kedaduratan bencana yang bisa ditangani Desa bisa terselesaikan.

2.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas atas penggunaan sumberdaya yang ada. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu capaian SPM dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah - rendahnya.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Gambar 2. 15 Perhitungan Efisiensi Anggaran

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu perangkat daerah misalnya biaya dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Efisiensi Anggaran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 40 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MISI 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi								
	Tujuan								
	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	126,18						
	Sasaran								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,33	Program Pendaftaran Penduduk	1.889.168.682	1.864.479.350	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100	1,3
				Program Pencatatan Sipil	224.153.000	223.249.716	Cakupan Pendaftaran Sipil	100	0,4
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	969.656.000	941.299.151	Presentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100	2,9
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.500.000	78.746.933	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100	5,7
				Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	34.171.241.000	33.067.769.265	Nilai IKM Setda	106,63	9,2

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23.444.762.000	22.667.281.813	Nilai EKPPD	117,63	17,8
					Program Perekonomian dan Pembangunan	1.473.483.000	1.396.703.651	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	106,67	11,1
					Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	41.173.223.000	40.604.769.877	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariatan DPRD	100	1,4
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.924.831.000	15.210.557.886	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	100	10,1
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.764.574.000	18.914.288.622	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	67,3
					Program Kepegawaian Daerah	2.080.283.000	1.407.403.109	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	109,80	38,4
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.879.526.000	1.778.242.450	Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	93,27	-1,4
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.405.460.457	59.188.741.393	Indeks kondusifitas Kecamatan	100	5,2

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.600.993.000	1.580.419.780	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan		#DIV/0!
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.199.219.000	9.096.856.820	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kelurahan	102,92	3,9
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	401.891.000	399.755.350	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	0,5
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.331.363.000	4.273.561.354	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	245	59,7
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	95,81	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	174.000.000	171.259.307	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	115,25	14,6

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
		2	Opini BPK	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.254.237.335	2.989.979.646	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,35	-14,3
					Program Pengelolaan Arsip	365.822.000	365.066.263	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	99,48	-0,3
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.345.676.000	5.245.635.348	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1,9
					Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.196.614.000	1.179.022.595	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	111,11	11,3
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	636.688.000	619.683.455	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	100	2,7
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	482.039.000	475.689.611	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	88,89	-11,0
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.576.542.000	8.433.420.917	Cakupan pelayanan penunjang	100	1,7

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							urusan pemerintahan daerah		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.216.908.000	1.192.932.811	Nilai Leveling APIP	100	2,0
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	674.000.000	667.637.555	Indeks Persepsi Korupsi	114,71	13,6
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	21.045.103.000	20.062.391.420	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	4,7
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	681.849.851.000	680.366.607.925	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	98,34	-1,5
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000	1.696.729.074	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1,4
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000	5.067.031.269	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	101,94	2,9
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	107,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.962.087.000	4.714.602.927	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	5,0
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.656.843.000	5.576.658.357	Indeks PPID	106,49	7,4

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.061.125.000	3.028.602.398	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	115,32	14,2
	MISI 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya									
	Tujuan									
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	101,24						
	Sasaran									
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	100,18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	430.705.523.27 ₂	412.745.486.27 ₁	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	4,2
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.128.059.00 ₀	123.152.323.55 ₈	Persentase Capaian SPM Kesehatan	99,26	3,2
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.402.385.000	3.313.798.383	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100	2,6
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	548.172.000	547.419.504	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100	0,1
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.171.781.000	3.064.315.298	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	129,79	25,6

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	553.801.000	552.678.670	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,53	-4,5
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17.236.330.000	16.977.177.744	Persentase prestasi Olahraga (persen)	95,46	-3,2
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	605.930.000	604.242.710	Cakupan prestasi kepramukaan	104,99	5,0
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	100,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	772.366.456.727	750.653.812.267	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2,8
					Program Pengelolaan Pendidikan	221.827.858.000	219.319.618.505	Angka Partisipasi Kasar	98,92	0,1
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	18.918.000	18.915.820	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	100	0,0
		2	Harapan Lama Sekolah	97,95						
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	99,90	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	592.281.000	589.977.195	cakupan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	328,60	69,7

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Perlindungan Perempuan	141.840.000	139.640.250	cakupan program perlindungan perempuan	100	1,6
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	30.644.000	30.209.000	cakupan program peningkatan kualitas keluarga	127,96	23,0
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	31.996.000	31.951.000	cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	100	0,1
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	142.622.000	140.637.600	kategori kabupaten layak anak (KLA)	100	1,4
				Program Perlindungan Khusus Anak	262.701.000	256.774.184	Cakupan perlindungan khusus anak	100	2,3
				Program Pengendalian Penduduk	715.390.000	660.651.702	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	156,02	40,8
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.907.193.000	10.264.431.187	Presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan	110,13	14,5

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
								dengan jumlah PUS		
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.066.108.000	6.903.004.998	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	101,63	3,9
		2	Cakupan Perlindungan Anak	100,0						
	MISI 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan									
	Tujuan									
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	102,91						
	Sasaran									
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	90,67	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.852.649.000	2.811.114.860	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1126,13	91,2
					Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.092.215.000	3.016.078.548	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	110,87	12,0

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	53.456.000	52.610.400	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100	1,6
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	383.464.000	381.371.504	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	85,57	-16,2
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.149.436.000	13.243.058.961	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	286,77	69,5
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.264.532.053	11.930.652.125	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	82,73	-17,6
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.019.714.000	1.969.164.086	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	8,65	-1027,1

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	591.132.000	561.182.620	Persentase Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	12,00	-691,4
				Program Perizinan Usaha Pertanian	50.068.000	49.367.250	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100	1,4
				Program Penyuluhan Pertanian	2.436.022.000	2.333.759.541	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	100	4,2
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	140,38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.259.591.000	4.058.374.133	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	4,7
				Program Penataan Desa	31.000.000	30.927.000	Persentase Desa Tertata	100	0,2
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.871.496.000	1.860.451.568	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100	0,6
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	797.147.000	795.728.947	Jumlah Bumdesa yang meningkat Klasifikasinya	103,57	3,6
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.126.963.000	2.119.726.076	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100	0,3

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000	19.874.700	Persentase Koperasi yang Sehat	83,33	-19,3
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	277.287.000	266.081.564	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	135,22	29,0
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	445.730.000	429.165.134	Persentase Advokasi kepada Koperasi	136,03	29,2
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.836.560.000	1.740.302.449	Prosentase Peningkatan UKM yang berkualitas	127,64	25,8
				Program Pengembangan UMKM	2.058.007.000	1.976.006.349	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbina yang meningkat Omsetnya	227,50	57,8
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.118.500.000	1.109.864.013	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	174,03	43,0
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	80.366.000	79.572.295	Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	100	1,0
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	43.554.000	43.155.903	Terinformasikannya Jumlah Dokumen	100	0,9

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
								Informasi Industri		
										#DIV/0!
3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier		PDRB ADHK Sektor Tersier	89,97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.836.327.773	6.522.217.273	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	4,6
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.100.585.000	3.011.941.094	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	99,49	2,4
					Program Pemasaran Pariwisata	2.390.924.000	2.320.188.566	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	162,35	40,2
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60.000.000	59.515.950	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	500	80,2
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.050.281.850	10.431.303.699	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	5,6

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	19.333.696.000	18.809.503.612	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	95,47	-1,9
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	218.227.000	217.039.173	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	609,33	83,7
				Program Pengembangan Ekspor	325.366.000	323.644.489	Jumlah Nilai Ekspor IKM	1.987,67	95,0
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	173.754.000	171.671.936	Persentase UTTP Yang Tertera	148,34	33,4
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	639.474.000	633.541.053	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	140,26	29,4
4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	96,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.962.509.000	3.780.903.145	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	4,6
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	74.900.000	73.995.278	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	156,67	36,9
				Program Promosi Penanaman Modal	223.983.000	219.049.650	Jumlah Dokumen Kepeminatan	100	2,2

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							Investasi Daerah		
				Program Pelayanan Penanaman Modal	283.240.000	282.914.312	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100	0,1
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	399.188.000	393.488.420	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	101,54	2,9
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	23.880.000	23.629.960	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100	1,0
				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	10.000.000	9.988.177		100	0,1
	Tujuan								
	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran	97,05						

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
			Bank Dunia)							
	Sasaran									
1	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat Kemiskinan	97,88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.554.504.000	4.241.248.848	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	6,9
					Program Pemberdayaan Sosial	38.030.000	37.674.020	prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	100,73	1,7
					Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.384.000	3.237.350	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	4,3
					Program Rehabilitasi Sosial	1.833.139.000	1.827.901.786	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	104,94	5,0
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.240.994.000	3.136.613.405	cakupan perlindungan jaminan sosial	107,83	10,2
					Program Penanganan Bencana	779.335.000	772.104.610	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi	100	0,9

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
								Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota		
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.200.000	14.200.000	prosentase TMP yang di kelola	100	0,0
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.777.974.000	18.420.820.022	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1,9
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	40.000.000	39.661.300	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	100	0,8
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662.381.000	656.389.787	Persentase diverivikasi dan ketahanan pangan	103,84	4,6
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.094.537.000	1.087.099.670	Persentase Desa yang tertangani kerawanan pangan	102,67	3,3
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	95.166.000	94.017.500	Persentase Hasil Pengawasan	101,81	3,0

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
								dan pembinaan keamanan pangan		
2	Berkurangnya pengangguran		Angka pengangguran	107,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.885.294.000	5.816.951.124	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1,2
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	456.152.000	455.239.487	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai "A"	100	0,2
					Program Penempatan Tenaga Kerja	532.464.000	530.719.872	Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	109,20	8,7
					Program Hubungan Industrial	157.276.000	157.028.500	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	150	33,4
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	139.000.000	138.374.027	Persentase Transmigran yang ditempatkan	30	-231,8
	MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan									
	Tujuan									

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	101,9						
	Sasaran									
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	107,98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.923.320.000	21.112.535.528	Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	93,10	-3,4
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.424.055.000	14.363.651.284	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	98,39	5,3
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.840.213.000	10.908.262.842	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	113,60	18,9
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.461.678.000	5.183.455.571	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	95,01	0,1
					Program Penataan Bangunan Gedung	4.300.007.000	4.125.001.260	Prosentasi Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	99,59	3,7
					Program Penataan dan Bangunan Lingkungannya	10.088.638.000	9.576.434.277	Persentase Bangunan dan Lingkungan	100	5,1

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							yang Tertangani		
				Program Penyelenggaraan Jalan	109.214.422.288	105.407.880.235	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	94,27	-2,4
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	99.699.000	97.700.200	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100	2,0
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	581.133.000	579.659.081	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100	0,3
				Program Pengembangan Perumahan	533.801.000	532.653.390	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	100	0,2
				Program Kawasan Permukiman	2.138.286.000	2.084.167.409	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	104,77	7,0
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.130.900.000	2.100.372.754	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	96,70	-1,9
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.937.729.000	9.895.948.801	Persentase peningkatan	172,65	42,3

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							akses air limbah aman		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.718.448.000	6.203.712.539	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,38	5,2
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32.326.952.000	31.587.678.476	Indeks Infrastruktur Perhubungan	96	-1,8
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90,62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.730.556.000	12.339.942.311	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3,1
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	342.358.000	332.736.963	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	110	11,6
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.263.719.400	1.247.652.807	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	90,52	-9,1
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.374.753.600	2.360.814.567	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	110,02	9,6
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	38.531.000	38.147.354	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	100,43	1,4

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	69.055.000	68.869.614	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	82,84	-20,4
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	82.043.000	81.814.863	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	97,25	-2,5
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	46.656.000	46.453.400	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	141,66	29,7
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16.464.000	15.179.500	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100	7,8
					Program Pengelolaan Persampahan	9.779.565.000	9.703.525.876	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	130,48	24,0
	MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat									
	Tujuan									
	Sasaran									

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	155,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.591.242.581	3.458.436.561	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3,7
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000	410.838.741	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	762,56	87,0
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	25.692.385.000	25.562.296.650	Capaian partisipasi masyarakat/ penduduk dalam proses pemilihan umum	100	0,5
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.341.000	236.958.200	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	0,2
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.722.842.000	1.713.797.770	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan	901,23	89,0

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							Pembinaan Wawasan Kebangsaan		
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.321.847.000	1.300.335.154	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	155,55	36,8
2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	295,34	Program Pengembangan Kebudayaan	4.139.238.000	3.896.224.927	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	290,87	67,6
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	20.169.774.000	19.704.577.373	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	295,37	66,9
	Tujuan								
	Mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100						
	Sasaran								
1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.520.403.955	9.935.555.445	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	91,15	-3,6

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.832.835.027	7.521.297.054	Persentase Penegakan Perda	100	4,0
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.292.221.000	3.182.648.044	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	118,58	18,5
2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.898.526.284	3.773.919.597	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	96,80	0,0
					Program Penanggulangan Bencana	5.439.657.000	5.239.533.179	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	3,7
	Rata-rata			115,41				Rata-rata	146,70	
Keterangan : unaudited								Efisiensi		7,8

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka **7,8** dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20 sampai dengan 20)

Ditinjau dari aspek efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2.3.7 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Tujuan						
	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	126,18				
	Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,33	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pendaftaran Sipil	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100	Menunjang
				Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Nilai IKM Setda	106,63	Menunjang
				Program Pemerintahan dan	Nilai EKPPD	117,63	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Kesejahteraan Rakyat			
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	106,67	Menunjang
					Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariat an DPRD	100	Menunjang
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	100	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	100	Menunjang
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	109,80	Menunjang
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	93,27	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kondusifitas Kecamatan	100	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan		Menunjang
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	102,92	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
						publik di kelurahan		
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	100	Menunjang
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	245,00	Menunjang
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	95,81	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	115,25	Menunjang
		2	Opini BPK	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan-an daerah	80,35	Menunjang
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	99,48	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintaha n daerah	100	Menunjang
					Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	111,11	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	100	Menunjang
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	88,89	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Leveling APIP	100	Menunjang
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Korupsi	114,71	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	98,34	Menunjang
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	101,94	Menunjang
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel		Indeks SPBE	107,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	106,49	Menunjang
					Program Pengelolaan	Nilai Domain Layanan SPBE dalam	115,32	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Aplikasi Informatika	Penilaian Indeks SPBE		
	Tujuan							
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	101,24				
	Sasaran							
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	100,18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Kesehatan	99,26	Menunjang
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100	Menunjang
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100	Menunjang
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	129,79	Menunjang
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,53	Menunjang
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase prestasi Olahraga (persen)	95,46	Menunjang
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan prestasi kepramukaan	104,99	Menunjang
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	100,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Kabupaten/ Kota			
					Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar	98,92	Menunjang
								Menunjang
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	100	Menunjang
		2	Harapan Lama Sekolah	97,95				
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	99,90	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	cakupan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/ kota	328,60	Menunjang
					Program Perlindungan Perempuan	cakupan program perlindungan perempuan	100	Menunjang
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	cakupan program peningkatan kualitas keluarga	127,96	Menunjang
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	100	Menunjang
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	kategori kabupaten layak anak (KLA)	100	Menunjang
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100	Menunjang
					Program Pengendalian Penduduk	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	156,02	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS	110,13	Menunjang
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	101,63	Menunjang
		2	Cakupan Perlindungan Anak	100,0				
	Tujuan							
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	102,91				
	Sasaran							
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	90,67	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.126,13	Menunjang
					Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	110,87	Menunjang
					Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100	Menunjang
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	85,57	Menunjang
					Program Penyediaan dan Pengembang	Persentase Penyediaan dan Pengemban	286,77	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					an Sarana Pertanian	gan Sarana Pertanian		
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	82,73	Menunjang
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	8,65	Menunjang
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12,00	Menunjang
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100,00	Menunjang
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	100,00	Menunjang
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder		PDRB ADHK Sektor Sekunder	140,38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
					Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	100,00	Menunjang
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	100,00	Menunjang
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdesa yang meningkat Klasifikasinya	103,57	Menunjang
					Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100,00	Menunjang
					Program Pengawasan dan	Persentase Koperasi yang Sehat	83,33	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Pemeriksaan Koperasi			
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	135,22	Menunjang
					Program Pemberdaya- an dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi	136,03	Menunjang
					Program Pemberdaya- an Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Peningkatan UKM yang berkualitas	127,64	Menunjang
					Program Pengembang- an UMKM	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbina yang meningkat Omsetnya	227,50	Menunjang
					Program Perencanaan dan Pembangun- an Industri	Persentase pertumbuh- an produksi gula semut organik dan pertumbuh- an produksi rokok bercukai KIHT	174,03	Menunjang
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terinformasi kannya Jumlah Dokumen Informasi Industri	100	Menunjang
3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier		PDRB ADHK Sektor Tersier	89,97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah- an daerah	100	Menunjang
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	99,49	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	162,35	Menunjang
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	500	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	95,47	Menunjang
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	609,33	Menunjang
					Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Nilai Ekspor IKM	1987,67	Menunjang
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Yang Tertera	148,34	Menunjang
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	140,26	Menunjang
4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	93,07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	156,67	Menunjang
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	100	Menunjang
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100	Menunjang
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	101,54	Menunjang
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		100	Menunjang
	Tujuan							
	Meningkatkan pemerataan pembangunan		Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	97,05				
	Sasaran							
1	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat Kemiskinan	97,88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase peningkatan	100,73	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
						kemampuan SDM Kesos		
					Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	Menunjang
					Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	104,94	Menunjang
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial	107,83	Menunjang
					Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase TMP yang di kelola	100	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah-an daerah	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	100	Menunjang
					Program Peningkatan	Persentase diverifikasi	103,84	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	dan ketahanan pangan		
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang tertangani kerawanan pangan	102,67	Menunjang
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Hasil Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	101,81	Menunjang
2	Berkurangnya pengangguran		Angka pengangguran	107,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah-an daerah	100	Menunjang
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai "A"	100	Menunjang
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	109,20	Menunjang
					Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	150	Menunjang
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang di tempatkan	30	Menunjang
	Tujuan							
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	101,9				
	Sasaran							
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	107,98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang-an Urusan Pemerintaha n Daerah	93,10	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	98,39	Menunjang
					Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	113,60	Menunjang
					Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	95,01	Menunjang
					Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentasi Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	99,59	Menunjang
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungan- nya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100	Menunjang
					Program Penyelenggar aan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	94,27	Menunjang
					Program Pengembang an Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100	Menunjang
					Program Penyelengga- raan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100	Menunjang
					Program Pengembang- an Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	100	Menunjang
					Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	104,77	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
						dibawah 10 ha		
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	96,70	Menunjang
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan akses air limbah aman	172,65	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,38	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	96	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90,62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	110	Menunjang
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	90,52	Menunjang
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	110,02	Menunjang
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	100,43	Menunjang
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan	82,84	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ijin lingkungan		
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	97,25	Menunjang
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase fasilitaasi penghargaan lingkungan hidup	141,66	Menunjang
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentaase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	130,48	Menunjang
	Tujuan							
	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat		Indeks Kesalehan Sosial	106,01				
	Sasaran							
1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan		Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	155,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan	762,56	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
						Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum	100	Menunjang
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	Menunjang
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	901,23	Menunjang
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	155,55	Menunjang
2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan		Persentase budaya yang dilestarikan	295,34	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	290,87	Menunjang
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	295,37	Menunjang
	Tujuan							
	Mewujudkan kondusitivitas wilayah		Indeks Kondusivitas Wilayah	100,00				

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Sasaran						
1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	91,15	Menunjang
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100,00	Menunjang
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	118,58	Menunjang
2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	96,80	Menunjang
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Menunjang
	Rata-rata		115,41	Total	Rata-rata	146,70	

Sumber: LKJiP Bagian Organisasi Tahun 2023

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa 125 (seratus dua puluh lima) Program dengan rata-rata capaian kinerja 146,70 menunjang dan 28 (dua puluh delapan) indikator tujuan/ sasaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan/sasaran sebesar **111,27** atau Kategori Kinerja **Baik Sekali Baik**.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.1.1 Target Kinerja

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA- 090.02.4.039600/2023 tanggal 30 November 2022 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Rincian Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) untuk pembangunan Pasar Rakyat Pagi Kebumen di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

3.1.2 Realisasi

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 3.000.000.000,- terealisasi Rp. 2.838.039.699,- atau sebesar 94,60%.

Tabel 3. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2023

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementrian Perdagangan RI	SP DIPA-090.02.4.039600/2023	Program Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000.000	2.838.093.699	94.60%	1	100%	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1 Target Kinerja

Tidak ada tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan.

3.2.2 Realisasi

Tidak ada realisasi karena tidak terdapat tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Hal ini mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar ditetapkan target sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Target Capaian SPM Pendidikan Tahun 2023

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PENDIDIKAN								
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	22.650	12 bulan	Perlengkap an dasar peserta didik	22.650	12 bulan	34.623.405.000
					Kepala Sekolah	672	12 bulan	
					Tenaga Penunjang	1318	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	172.941	12 bulan	Perlengkap an dasar peserta didik	172.941	12 bulan	127.365.459.000
					Pendidik/ Guru	10.459	12 bulan	
					Kepala Sekolah	997	12 bulan	
					Tenaga Penunjang	4863	12 bulan	
4.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.133	12 bulan	Perlengkap an Dasar Peserta Didik	1.133	12 bulan	2.916.690.000
					Kepala Satuan Pendidik	27	12 bulan	
					Tenaga Penunjang	102	12 bulan	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

4.1.3 Alokasi Anggaran

Tabel 4. 2 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
BIDANG PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	0	34.623.405.000	0
2	Pendidikan Dasar	0	127.365.459.000	0
3	Pendidikan Menengah Pertama	0	60.160.721.000	0
4	Pendidikan Kesetaraan	0	2.916.690.000	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Dukungan Personel Penerpan SPM Kabupaten Kebumen T0oahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
BIDANG PENDIDIKAN		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1.990
2	Pendidikan Dasar	16.319
3	Pendidikan Kesetaraan	129

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.1.5 Realisasi

Tabel 4. 4 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	22.650	22.650	100	34.815.205.000	34.676.503.239	99,60
2	Pendidikan Dasar	172.941	172.941	100	123.192.759.000	121.415.339.569	98,56
3	Pendidikan Kesetaraan	1.133	1.133	100	2.906.573.000	2.906.573.000	98,66

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 5 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pendididikan Anak Usia Dini	22.650	22.650	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Perlengkapan dasar peserta didik	22.650	33.650	100%	20
2	Kepala Sekolah	672	672	100%	20
3	Tenaga Penunjang	1.318	1.318	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 6 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Dasar	172.941	172.941	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Perlengkapan dasar peserta didik	172.941	172.941	100%	20
2	Pendidik/Guru	10.459	10.459	100%	20
3	Kepala Sekolah	997	997	100%	20
4	Tenaga Penunjang	4863	4863	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 7 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Kesetaraan	1.133	1.133	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Perlengkapan dasar peserta didik	1.133	1.133	100%	20
2	Kepala Satuan Pendidik	27	27	100%	20
3	Tenaga Penunjang	102	102	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 8 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Dasar	100	Tuntas Paripurna
3	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Anak usia 5-6 tahun	Sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia di bawah 7 tahun (5-6 tahun)	Dilakukan Assesment oleh dokter pemerintah (RSDS) untuk mengetahui kemampuan anak mengikuti belajar mengajar
2	Anak usia 12-15 tahun	Terdapat anak usia sekolah 12-15 tahun di Ponpes tanpa mengikuti pendidikan SMP/MTs/Sederajat	Sosialisasi Gerakan Kembali Bersekolah
3	Masyarakat	Faktor kemiskinan	Beasiswa Kurang Mampu (BKM), Program Indonesia Pintar (PIP)
4	Anak usia sekolah	Anak Putus Sekolah (Pernikahan di usia dini, bekerja dll)	Melaksanakan program pendidikan kesetaraan melalui penguatan PKBM

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 111). Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun

2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mendasari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan target sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG KESEHATAN								
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	16.289	12 bulan	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu, Buku KIA	16.289	12 bulan	3.368.541.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	16.289	12 bulan	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Fotograf	16.289	12 bulan	88.000.000
3	Pelayanan kesehatan	Presentase bayi baru	16.259	12 bulan	Formulir Bayi Baru	16.259	12 bulan	35.000.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	bayi baru lahir	lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA			
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	74.028	12 bulan	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	74.028	12 bulan	1.819.869.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	186.457	12 bulan	Buku Rapor Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil	186.457	12 bulan	531.560.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah			
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	533.922	12 bulan	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	533.922	12 bulan	1.635.481.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standard	167.524	12 bulan	Buku Kesehatan lansia	167.524	12 bulan	778.940.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang	58.291	12 bulan	Pedoman Pengendalian Hipertensi	58.291	12 bulan	40.000.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		Mendapat-kan pelayanan kesehatan sesuai standar			dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM			
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase penderita DM yang mendapat-kan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.339	12 bulan	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	10.339	12 bulan	45.000.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapat-kan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	4.426	12 bulan	Buku Pedoman Diagnosis Penggolong an Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolong an Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan Formulir Pencatatan dan	4.426	12 bulan	279.480.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Pelaporan, Media KIE			
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	16.568	12 bulan	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pedoman/S tandar Operasional Prosedur	16.568	12 bulan	448.279.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi di HIV sesuai standar	23.273	12 bulan	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	23.273	12 bulan	513.390.000

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.2.3 Alokasi Anggaran

Tabel 4. 11 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN (DAK)	APBD	Sumber Lain Yang Sah
BIDANG KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	3.333.541.000	35.000.000	0
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	63.000.000	25.000.000	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	0	35.000.000	0
4	Pelayanan kesehatan balita	1.774.869.000	45.000.000	0
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	510.768.000	20.792.000	0
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.585.481.000	50.000.000	0
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	74.8940.000	30.000.000	0
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	0	40.000.000	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	0	45.000.000	0
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	229.480.000	50.000.000	0
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	408.279.000	40.000.000	0
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	458.390.000	55.000.000	0

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 12 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
BIDANG KESEHATAN		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	616
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	616
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	565
4	Pelayanan kesehatan balita	600
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	635
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	635
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	635
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	600
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	635
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	70
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	200
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	235

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.2.5 Realisasi

Tabel 4. 13 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	16.289	16.289	100	3.368.541.000	3.268.202.803	97,02
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	16.289	16.289	100	88.000.000	87.894.200	99,88
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	16.259	16.259	100	35.000.000	34.692.900	99,12
4	Pelayanan kesehatan balita	74028	74028	100	1.819.869.000	1.761.339.800	96,78
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	18.6457	18.6457	100	531.560.000	423.693.600	79,71
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	533.922	533.922	100	1.635.481.000	1.624.080.700	99,30
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	167.524	167.524	100	778.940.000	747.422.864	95,95

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	58.291	58.291	100	40.000.000	39.972.300	99,93
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	10.339	10.339	100	45.000.000	44.974.000	99,94
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.426	4.426	100	279.480.000	264.518.223	94,65
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	16.568	16.568	100	448.279.000	420.684.300	93,84
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	23.273	23.273	100	513.390.000	501.810.508	97,74

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 14 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	16.289	16.289	100	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA	16.289	16.289	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 15 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	16.289	16.289	100	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Fotograf	16.289	16.289	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 16 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	16.259	16.259	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA	16.259	16.259	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 17 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Balita) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan balita	74.028	74.028	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	74.028	74.028	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 18 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	186.457	186.457	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Buku Raport Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan,	186.457	186.457	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 19 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	533.922	533.922	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	533.922	533.922	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	167.524	167.524	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Buku kesehatan lansia	167.524	167.524	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	58.291	58.291	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	58.291	58.291	100%	20

TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)	20
---	----

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 22 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	10.339	10.339	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	10.339	10.339	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 23 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan ODGJ) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.426	4.426	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Media KIE	4.426	4.426	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	16.568	16.568	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur	16.568	16.568	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 25 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	23.273	23.273	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	23.273	23.273	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 26 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan kesehatan balita	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Tuntas Paripurna
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	Tuntas Paripurna
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 27 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Beban Petugas yang tinggi	Menambah SDM, Peningkatan kompetensi
2	Anggaran	Kebijakan juknis penggunaan anggaran khususnya DAK yang belum bisa sinkron dengan aturan di Daerah	Koordinasi kebijakan penggunaan anggaran dengan Instansi Induk
II	EKSTERNAL		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
4	Pelayanan kesehatan balita	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
	tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen)
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen)

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut :

Tabel 4. 28 Target Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PEKERJAAN UMUM								
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah	461.823	12 bulan	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	82.010	12 bulan	9.048.250.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		memiliki akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota						
					Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	373.813	12 bulan	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Total yang terlayani	1.921	12 bulan	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasa bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembang an SPALD-S dengan	1.658	12 bulan	9.336.773.0000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha			
					Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	338	12 bulan	600.956.000
					Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa	13	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2023

4.3.3 Alokasi Anggaran

Tabel 4. 29 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0	9.048.250.000	0
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	0	9.937.738.000	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.3.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 30 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	502 rang yang terdiri dari: - DPUPR 10 orang - PDAM 79 orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
		- Dinkes 35 orang - KPSPAMS 378 orang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	16 orang dan 4 armada dibawah koordinasi Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.3.5 Realisasi

Tabel 4. 31 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	461.823	461.823	100	8.409.857.000	8.409.857.000	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.921	1.921	100	9.937.738.000	9.937.738.000	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 32 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	461.823	461.823	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	375.313	375.313	100%	20
2	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	86.510	86.510	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 33 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.921	1.921	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	1.658	1.658	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
2	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	338	338	100%	20
3	Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	13	13	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 34 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Tuntas Utama
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	Tuntas Utama

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 35 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Sumber daya alam	Terbatasnya sumber mata air bersih	Penyediaan SPAM regional bersama
2	Sumber daya alam	Sumber akses air minum belum layak	Pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM regional bersama
3	Sumber daya alam	Masih terdapat warga yang belum mendapatkan pelayanan akses air minum layak.	Peningkatan kualitas akses air minum layak secara berkala.
4	Sarana dan prasarana	Masih banyak masyarakat yang belum punya tangki septik yang standar/SNI (+/- 25%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum maksimal	Lewat program DAK Sanitasi masyarakat akan membuat Tangki septik yang sesuai standart SNI
5	Kondisi geografis	Kondisi geografis Kabupaten Kebumen	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan

- Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:
- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatditetapkan target sebagai berikut :

Tabel 4. 36 Target Capaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	12 bulan	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	502.765.000
					Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	1	12 bulan	
					Pembangun an Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	10	12 bulan	
					Pembangun an Kembali Rumah Bagi	-	-	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Korban Bencana			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	6	12 bulan	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	90.000.000
					Penyediaan Rumah Layak Huni	6	12 bulan	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2023

4.4.3 Alokasi Anggaran

Tabel 4. 37 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	0	502.765.000	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	0	90.000.000	0

	pemerintah daerah daerah kabupaten			
--	------------------------------------	--	--	--

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 38 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat secara umum berasal dari pegawai Bidang Perumahan Dinas DISPERKIMUB Kab.Kebumen dimana pada tahun 2023 jumlah personil sebanyak 23 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 12 orang.
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	Jumlah personil sebanyak 23 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 12 orang.

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.4.5 Realisasi

Tabel 4. 39 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang	11	11	100	502.765.000	502.765.000	100

	layak huni bagi korban bencana kabupaten						
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	6	6	100	90.000.000	90.000.000	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 40 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	11	11	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	1	1	100%	20
3	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	10	10	100%	20

4	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	n/a	n/a	n/a	n/a
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2023

Tabel 4. 41 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	6	6	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Penyediaan Rumah Layak Huni	6	6	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2023

Tabel 4. 42 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 43 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	Perencanaan	Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyat adalah Penanganan rumah korban bencana tidak dapat segera dilaksanakan setelah terjadi bencana.	Penanganan rumah korban bencana dilaksanakan pada tahun N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggaran dalam APBD.
2	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
3	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Masyarakat	Dari beberapa masyarakat korban bencana tidak memiliki lahan yang lebih aman untuk relokasi	Sosialisasi dan pendekatan persuasive kepada masyarakat korban bencana agar bersedia direlokasi dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk disediakan rumah susun bagi korban bencana yang tidak punya lahan

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota,

- a. jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :
- b. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelayanan informasi rawan bencana;
- d. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 44 Target Capaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	12 bulan	Penegakan Perda sesuai SOP	1	12 bulan	7.832.835.027
					Pelaksanaan penegakan perda menggunakan	n/a	n/a	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Sarpras sesuai standar			
					Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	n/a	n/a	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	726.453	12 bulan	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	n/a	n/a	400.000.000
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan	726.453	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	12 bulan	2.125.000.000
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22.099	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22.099	12 bulan	1.805.000.0000
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	1 KLB	12 bulan	
					Melakukan respon cepat KLB dan	2 KLB,	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	7 SK darurat bencana		
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	40.920	12 bulan	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	50	12 bulan	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	50	12 bulan	3.292.221.000
					Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga	26 kecamatan	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
					dan identitas kependudukan				

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.5.3 Alokasi Anggaran

Tabel 4. 45 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
BIDANG TRANTIBUMLINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	0	7.832.835.027	0
2	Pelayanan informasi rawan bencana	0	400.000.000	0
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	1.875.000.000	0
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	1.805.000.000	0
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	3.292.221.000	0

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.5.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 46 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
BIDANG TRANTIBUMLINMAS		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	21 orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
		dibawah koordinasi Satpol PP Kab. Kebumen
2	Pelayanan informasi rawan bencana	43 orang (karyawan BPBD)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	43 orang (karyawan BPBD)
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	578 orang (relawan)
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	210 orang dibawah koordinasi Satpol PP Kab. Kebumen

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.5.5 Realisasi

Tabel 4. 47 Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1	1	100	7.832.835.027	7.521.297.054	96,02
2	Pelayanan informasi rawan bencana	726.453	726.453	100	400.000.000	395.181.495	98,8
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	2.902	100	1.875.000.000	1.864.505.350	99,4
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22.099	22.099	100	1.805.000.000	1.783.384.622	98,8
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90	90	100	3.292.221.000	3.182.648.044	96,67

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 48 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Persentase	Indeks Pencapaian
----	-----------------------	--------------------------	------------	-------------------

		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	(4:3 x 100%)	Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1	1	100	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Penegakan Perda sesuai SOP	1	1	100%	20
2	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	n/a	n/a	n/a	n/a
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 49 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Persentase	Indeks Pencapaian
----	-----------------------	--------------------------	------------	-------------------

		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	(4:3 x 100%)	Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	726.453	726.453	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	726.453	726.453	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 50 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	2.902	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	726.453	726.453	100%	20
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	2.902	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 51 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22.099	22.099	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22.099	22.099	100%	20
2	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	3	3	100%	20
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	7	7	100%	20
4	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	22.099	22.099	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 52 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90	90	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	90	90	100%	20
2	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	26 kec	26 kec	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 53 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 54 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten
Kebumen Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Masyarakat	Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan ganti rugi akibat penegakan perda/perkada	Sosialisasi
2	Desa rawan bencana	Banyaknya desa rawan bencana	Mendorong desa yang berada di daerah rawan bencana untuk

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		menyebabkan banyaknya peralatan EWS bencana dan papan rambu kebencanaan yang harus di pasang	memasang papan rambu kebencanaan dengan menggunakan anggaran desa
3	Warga dan aparat	Banyaknya warga dan aparat yang belum di tingkatkan kapasitasnya akan kebencanaan	Mendorong agar desa menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi warganya yang berada di daerah yang beresiko terjadi bencana
4	Petugas/relawan	Jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana belum didukung dengan kemampuan teknis sesuai dengan klaster kebencanaan	Memberikan fasilitasi bagi organisasi relawan untuk peningkatan kapasitas dan berkoordinasi sesama organisasi relawan
5	Kondisi geografis	Belum seluruh wilayah Kabupaten Kebumen terjangkau <i>respon time</i> 15 menit	Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Mendasari Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4. 55 Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	783	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	30	12 bulan	20.000.000
					Penyediaan layanan kedaruratan layanan reaksi cepat	7	12 bulan	
					Penyediaan permakanan	150	12 bulan	412.367.000
					Penyediaan sandang	150	12 bulan	74.185.000
					Penyediaan alat bantu	120	12 bulan	112.108.000
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	17	12 bulan	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100	12 bulan	164.886.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	11	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					disabilitas terlantar			
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	12 bulan	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	140	12 bulan	190.000.000
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	12 bulan	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	12 bulan	
					Layanan rujukan	5	12 bulan	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti social	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan	261	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	30	12 bulan	17.000.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		dasarnya di luar panti						
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	7	12 bulan	
					Penyediaan permakanan	100	12 bulan	145.656.000
					Penyediaan sandang	100	12 bulan	17.490.000
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	12 bulan	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	12 bulan	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	2	12 bulan	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	12 bulan	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	12 bulan	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	12 bulan	
					Layanan rujukan	2	12 bulan	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti social	Persentase (%) lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti	242	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	15	12 bulan	10.000.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	12 bulan	
					Penyediaan permakanan	100	12 bulan	144.000.000
					Penyediaan sandang	100	12 bulan	30.524.800
					Penyediaan alat bantu	10	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	12 bulan	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	12 bulan	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	2	12 bulan	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1	12 bulan	
					Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2	12 bulan	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	12 bulan	
					Layanan rujukan	2	12 bulan	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti	118	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	20	12 bulan	10.000.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	50	12 bulan	20.000.000
					Penyediaan permakanan	20	12 bulan	25.000.000
					Penyediaan sandang	20	12 bulan	2.661.300
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	12 bulan	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	12 bulan	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan	1	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					dan pengemis			
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	12 bulan	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	12 bulan	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	12 bulan	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	12 bulan	
					Layanan rujukan	1	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	895	12 bulan	Penyediaan Permakanan	480	12 bulan	206.336.000
					Penyediaan Sandang	150	12 bulan	90.760.000
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	12 bulan	162.508.000
					Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)	115	12 bulan	123.107.000
					Pelayanan Dukungan Psikososial (Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan dan/atau rujukan)	s	12 bulan	44.516.000

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

4.6.3 Alokasi Anggaran

Tabel 4. 56 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
BIDANG SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	0	974.546.000	0
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti social	0	180.146.000	0
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti social	0	184.524.800	0
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	0	57.661.300	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	0	638.276.000	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.6.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 57 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	271
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	271
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	271
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	271

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	337

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.6.5 Realisasi

Tabel 4. 58 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	783	783	100	974.546.000	972.188.576	99,75
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	261	261	100	180.146.000	180.146.000	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti social	242	242	100	184.524.800	184.524.800	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	118	118	100	57.661.300	57.603.400	99,89
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	895	895	100	638.276.000	631.760.559	98,97

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 59 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	783	783	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	30	30	100%	20
2	penyediaan layanan kedaruratan	7	7	100%	20
3	penyediaan permakanaan	150	150	100%	20
4	penyediaan sandang	150	150	100%	20
5	penyediaan alat bantu	120	120	100%	20
6	penyediaan perbekalan kesehatan	17	17	100%	20
7	pemberian bimbingan firik, mental, priritual dan sosial	100	100	100%	20
	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	11	11	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	100%	20
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	140	140	100%	20
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%	20
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	50	100%	20
	Layanan rujukan	5	5	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 60 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	261	261	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	30	30	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	7	7	100%	20
3	Penyediaan permakanaan	100	100	100%	20
4	Penyediaan sandang	100	100	100%	20
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	100%	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	2	100%	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	2	2	100%	20
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda	1	1	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100%	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	100%	20
12	Layanan rujukan	2	2	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 61 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	242	242	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	15	15	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	100%	20
3	Penyediaan permakanaan	100	100	100%	20
4	Penyediaan sandang	100	100	100%	20
5	Penyediaan alat bantu	10	10	100%	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	2	100%	20
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	100%	20
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	2	2	100%	20
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100%	20
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2	2	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100%	20
13	Layanan rujukan	2	2	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 62 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	118	118	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	20	20	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	50	50	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
3	penyediaan permakanan	20	20	100%	20
4	Penyediaan sandang	20	20	100%	20
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100%	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	100%	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	100%	20
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100%	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100%	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%	20
12	Layanan rujukan	1	1	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 63 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	895	895	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Penyediaan Permakanan	480	480	100%	20
2	Penyediaan Sandang	150	150	100%	20
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	1	100%	20
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil,	115	115	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)				
5	Pelayanan Dukungan Psikososial (Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan dan/atau rujukan)	150	150	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20,00

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 4. 64 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4. 65 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Penyandang disabilitas	Verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan SPM, penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus disabilitas mental)	Memaksimalkan verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keluarga, desa, dan puskesmas saling memonitor
2	Modal usaha dan pemasaran	- masih terhambatnya pemasaran produk hasil pelatihan - terkendala faktor permodalan	- mempromosikan produk hasil pelatihan - mencari mitra usaha/pemberi modal
3	Lansia	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar tidak memiliki rumah layak huni, tidak memiliki anggota keluarga, di terlantarkan oleh keluarga dan tidak	Dirujuk ke panti khusus lansia, permohonan bedah rumah (jika memiliki hak tanah), pemberian permakanaan

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		mampu mengurus dirinya	
4	Penyandang disabilitas	- penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus untuk disabilitas mental) - rendahnya akses lapangan kerja - rendahnya tingkat keterampilan	Pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian pelatihan, peningkatan keterampilan, bimbingan rohani/spiritual, pemeriksaan kesehatan rutin

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

4.7 Program dan Kegiatan

Capaian SPM di Kabupaten Kebumen tahun 2023 didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan pendukung :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
 - Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 2. Pendidikan Dasar dengan kegiatan pendukung :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3. Pendidikan Kesetaraan dengan kegiatan pendukung :
- a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

B. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d) Pelayanan Kesehatan Balita
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- e) Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f) Pelayanan Kesehatan Usia Lansia
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- g) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i) Pelayanan Kesehatan Penderita DM
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k) Pelayanan kesehatan terduga tuberculosi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pekerjaan Umum

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 Penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari
 - a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
2. Program Kawasan Permukiman
 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
 - a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan/Peyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
- Pembangunan/Peyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

D. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan dan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota
 - 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kab/Kota

E. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Trantibum

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Penanggulangan Bencana

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- a) Kegiatan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

F. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Sosial

1. Program Rehabilitasi Sosial
- a) Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Alat bantu
 - Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - c) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2. Program Penanganan Bencana
- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan sandang

- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
- Pelayanan Dukungan Psikososial

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang otonom untuk menciptakan *clean governance* serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan program dan kegiatan di semua urusan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2023.

LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan akan menjadi titik tolak untuk mengarahkan cara pandang bagi perbaikan pembangunan di Kabupaten Kebumen kedepan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen dituntut untuk bisa menjadi lebih baik khususnya dalam menjawab permasalahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan LPPD ini di pandang bukan hanya sekedar pemenuhan formalitas belaka tetapi juga harus bisa menjadi semacam upaya moral agar penyelenggaraan pemerintah tetap memberikan perhatian lebih dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, kesehatan dan kebersihan hati bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian demi percepatan pembangunan di Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

1.1 Inovasi Daerah Tahun 2023

1. Pengembangan Program Pemanfaatan Pekarangan Lestari “Kebun Kita Agrismart”

Inovasi ini dilaksanakan dengan melakukan pendekatan membumikan pemanfaatan pekarangan. Inovasi ini sekaligus mendukung penanganan rawan pangan dan penanggulangan *stunting* serta mendukung penganekaragaman pangan. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap ketahanan pangan keluarga juga telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 526/259/2021 tentang Gerakan Optimalisasi Lahan Pekarangan. Salah satu wujud inovasi pemanfaatan pekarangan adalah AgriSMART yang bertempat di komplek Pendopo Bupati Kebumen sebagai percontohan. Selanjutnya tim Agrismart yang didukung oleh para penyuluh pertanian dan peternakan di 26 kecamatan siap memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah. Kebun kita dapat dijadikan contoh sebagai bentuk pemanfaatan pekarangan dengan berbagai komoditas dan teknologi seperti konsep *integrated farming* yang mengintegrasikan sub sektor pertanian tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya dan peningkatan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu konsep Agrismart juga dapat menjadi wahana wisata edukasi bagi anak untuk mengajarkan tentang dunia pertanian, serta dapat dijadikan tempat pelatihan teknologi pertanian sederhana dan murah. Disisi lain konsep Agrismart juga mengedepankan estetika dan hasil dari pemanfaatan pekarangan bagi peningkatan gizi keluarga sehingga mendukung penanganan rawan pangan dan penanggulangan *stunting* serta mendukung penganekaragaman pangan yang sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu TANI MULYO.

2. Pengembangan Agrobisnis Melalui Corporate Farming

Pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, namun sektor ini belum mampu menjadi sektor andalan dalam mensejahterakan masyarakat khususnya penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Sebagian besar masyarakat miskin Kabupaten Kebumen adalah petani. Beberapa permasalahan yang melingkupi sektor pertanian antara lain masalah SDM petani, kurangnya skala usaha sehingga tidak memenuhi skala ekonomis, kurangnya produktivitas, dan rendahnya nilai tambah produk pertanian. Selain itu kurangnya manajemen usaha dan akses pemasaran. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain dengan pengembangan pertanian untuk mendorong pengelolaan usaha pertanian secara kolektif melalui *corporate farming*. *Corporate farming* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan untuk

meningkatkan efisiensi usaha dan manajemen. Melalui *corporate farming* para petani dengan kondisi kepemilikan lahan yang terbatas dapat berkonsolidasi dengan petani lainnya dalam pola manajemen yang lebih baik guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Adapun pelaksana pengelolaan *corporate farming* melalui Gabungan Kelompok Tani. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 *corporate farming* telah dirintis di 18 desa pada 18 kecamatan dengan luasan 5 Ha pada masing-masing lokasi dan direncanakan akan dilanjutkan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.

3. Pengembangan Sistem Perlindungan Pekerja Migran, Keluarga dan Masyarakat melalui “SIPEMIKAT”

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian. Tingginya angka pengangguran Kabupaten Kebumen sebesar 5,9% pada tahun 2022 dengan total pencari kerja yang tercatat sebesar 13.620 orang tetapi jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sebesar 11.317, dan disisi lain potensi produksi tenaga kerja lulusan SMA/SMK yang berkompetisi mencari pekerjaan berjumlah sekitar 15.000 per tahun. Kondisi ini menjadikan sebagian tenaga kerja di Kabupaten Kebumen memilih bekerja sebagai pekerja migran atau bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran yang ditempatkan selama tiga tahun terakhir sebesar 3.358 orang. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan terkait pekerja migran. Setidaknya terdapat 18 kasus pada Tahun 2023 yang ditangani Balai Pelayanan Plindungan PMI (BP3MI).

Upaya peningkatan perlindungan pada PMI Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen membangun sistem kolaborasi yang terintegrasi atau “SIPEMIKAT” SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT. Inovasi ini bertujuan agar upaya perlindungan PMI lebih komprehensif merupakan sinergi pentahelix berkomitmen untuk memaksimalkan upaya perlindungan serta pemberdayaan PMI. Dalam pelaksanaannya terdapat pilar SIPEMIKAT sebagai pengembangan Desa Migran Produktif/DESMIGRATIF yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon PMI, PMI dan PMI purna penempatan beserta anggota keluarganya secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Inovasi ini melibatkan stakeholder seperti perangkat daerah terkait seperti Disdukcapil, dinas kesehatan, dan melibatkan instansi vertical seperti imigrasi, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI, serta pengadilan agama.

Hingga saat ini telah tersusun regulasi berupa Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebanyak 272 Perdes dan 337 database calon PMI, PMI maupun PMI purna penempatan dari jumlah total 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen. SIPEMIKAT, Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat bertujuan upaya perlindungan PMI lebih komprehensif, terbit peraturan desa, replikasi Desa Migran Produktif di 26 kecamatan, terbangun database PMI pada semua desa/kelurahan, pelibatan PMI dan keluarganya dalam kegiatan pembangunan

dengan anggaran desa, community parenting untuk anak PMI yang ditinggalkan, serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

4. Inovasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK)

Awalnya pemantauan harga kebutuhan pokok dilaksanakan dengan cara petugas datang ke pasar dan menanyakan harga komoditi ke pokmas, kemudian dicatat dan direkap, lalu kembali lagi ke kantor dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada pimpinan. Hal ini merupakan kendala yang besar bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yakni terkait dengan lamanya waktu pemantauan, keterbatasan SDM yang mengakibatkan hanya dapat memantau 2 Pasar saja, lamanya penyusunan laporan, penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, masyarakat sulit memperoleh informasi dan sulitnya melihat perkembangan harga guna memprediksi permasalahan yang dihadapi.

Dari permasalahan itu kemudian dibuatlah Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK) dalam bentuk website www.simbok.kebumenkab.go.id, aplikasi smartphone android berupa SIMBOK Kebumen dan aplikasi SIMBOK Petugas. Simbok Petugas digunakan oleh petugas untuk melakukan input data dengan SmartPhone android guna memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan. Data tersebut secara otomatis terkirim ke system yang ada di Website SIMBOK untuk diolah.

Dalam website SIMBOK kemudian data-data harga dari masing-masing pasar tersebut tersajikan secara realtime dan memberikan sajian data dalam bentuk yang menarik dan mudah digunakan seperti dalam bentuk tabel harga per-pasar, per-hari, per-minggu, per-bulan, per-tahun, dalam bentuk grafik perubahan harga tiap komoditi, perbandingan harga komoditi antara pasar satu dengan pasar lainnya dan pengguna juga dapat mendownload data tersebut dalam bentuk format pdf dan exel. Memberikan informasi akurat, cepat dan berkualitas terkait perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) secara periodik guna mengetahui kenaikan atau penurunan harga barang diluar harga normal.

Dengan inovasi teknologi informasi SIMBOK, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar rakyat di wilayah kabupaten kebumen dapat terpantau secara realtime setiap pagi dan dapat diakses oleh seluruh OPD, stakeholder dan masyarakat umum, juga dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2022 adanya pengembangan pada aplikasi SIMBOK pada menu home untuk informasi harga dengan *Early Warning System* dimana pengguna bisa mengetahui naik atau turunnya harga suatu komoditas dan memantau harga komoditas yang disajikan dalam bentuk statistik per pasar dan statistik per komoditas. Pada tahun 2023, aplikasi SIMBOK mengalami pembaharuan tampilan berupa SIMBOK mobile yang langsung bisa di download di website dan perbandingan harga

pasar per pasar. Website SIMBOK juga telah diintegrasikan dengan website lain antara lain blonjo.kebumenkab.go.id, corona.kebumenkab.go.id dan skm.kebumenkab.go.id

5. PUSKESOS “Rumah Harapan”

Merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Dilatarbelakangi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) RUMAH HARAPAN dan pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Sosial Republik Indonesia berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) RUMAH HARAPAN. Fungsi dari PUSKESOS RUMAH HARAPAN adalah sebagai media / wadah yang diberikan kepada masyarakat untuk berkonsultasi, menyampaikan aduan berkaitan dengan kemiskinan serta memberikan informasi tentang program perlindungan sosial. Terdapat 10 Layanan yang disediakan yaitu : (1) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), (3) Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (4) Rekomendasi Pelayanan Jamkesda, (5) Konsultasi bantuan sosial, PKH dan Sembako, (6) Rekomendasi adopsi anak, (7) Rehabilitasi PGOT dan ODGJ, (8) Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng, (9) Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS, (10) Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA). Dalam penyelenggaraan PUSKESOS RUMAH HARAPAN, Dinsos P3A Kabupaten Kebumen berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, BUMN dan Swasta. Saat ini sudah direplikasi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) PUSKESOS RUMAH HARAPAN di tingkat desa Kabupaten Kebumen

Pada tahun 2023, Inovasi ini mempunyai suatu kebaruan yaitu dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Rumah Harapan (SI RAMAH) yang sudah terhubung dengan aplikasi DESA ONLINE. SI RAMAH dilengkapi dengan *manual book* dan video tutorial yang dapat di akses pada website Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen <https://dinsosp3a.kebumenkab.go.id>.

Layanan sosial yang dapat dimanfaatkan dalam menu SI RAMAH pada aplikasi DESA ONLINE meliputi usulan rekomendasi KIS APBD, rekomendasi Baznas dan ID DTKS sebagai pengingat pada operator SIKS-NG agar diusulkan secara paralel untuk mendapatkan KIS APBN. Masyarakat cukup hadir ke Balai Desa dengan membawa data diri meliputi foto-foto KK, KTP, rumah tampak depan, foto ruang tamu, foto dapur, foto kamar mandi dan foto selfi.

6. Inovasi Penataan Ruang Terbuka Publik Sebagai Bagian Dari Pengembangan Pusat Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif

Berawal dari belum optimalnya penyediaan ruang terbuka publik untuk melakukan berbagai aktivitas berupa olahraga, hiburan, kesenian, sosial, kebudayaan

dan kemasyarakatan serta belum optimalnya pusat ekonomi berkelanjutan yang dapat diandalkan sebagai bagian dari upaya akselerasi perekonomian, maka Pemda Kabupaten Kebumen melakukan sebuah terobosan baru yaitu dengan melakukan inovasi penataan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pengembangan pusat ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi yang dilakukan adalah melalui revitalisasi dan penataan ulang infrastruktur ruang terbuka publik yang ada sehingga tetap mampu berperan sebagai ruang terbuka publik yang inklusif, sekaligus memperluas fungsi sebagai sarana berbagai aktivitas seperti olahraga, kesenian, ekonomi serta sosial budaya

Inovasi ini dilaksanakan di Koridor Perkotaan Kebumen, Moro Soetta di sepanjang ruas Jalan Soekarno - Hatta yang dulunya disebut Jalan Pahlawan, hingga Jalan Merdeka di seputaran Alun-alun Kebumen, dilanjutkan sepanjang Jalan Sutoyo hingga terhubung ruas Jalan Kusuma yang berada di pusat perkotaan Kebumen yang mempunyai nilai fungsi dan aksesibilitas sosial ekonomi yang tinggi sebagai poros pertumbuhan ekonomi.

Kondisi sebelum dilakukan revitalisasi infrastruktur, koridor perkotaan Kebumen kurang representatif keberadaannya, ruas jalan tersebut belum mampu mewadahi perkembangan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Permasalahan yang timbul diantaranya drainase yang kurang lancar sehingga terjadi genangan pada waktu hujan, parkir di kedua bahu jalan, pergerakan transportasi lambat, spesifikasi trotoar yang kurang nyaman sebagai pedestrian, banyaknya PKL serta ruang terbuka hijau (RTH) yang terbatas.

Inovasi ini berupaya menawarkan sudut pandang baru kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang publik. Masyarakat yang selama ini memiliki kebutuhan terhadap ruang dan menuntut akan pemenuhannya (pusat aktivitas masyarakat dan gedung kesenian) ditawarkan dengan konsep pemanfaatan ruang publik terbuka untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut. Caranya adalah dengan mengubah bentuk, desain, tampilan dan peruntukannya sehingga sesuai dengan kebutuhan akan ruang publik yang ada.

Inovasi penataan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pengembangan pusat ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melibatkan beberapa perangkat daerah dengan jenis kegiatan berupa pembangunan Drainase Pengendalian banjir/genangan air di wilayah pasar Tumenggungan dan sekitarnya, pembangunan sarana perdagangan induk yang representative dan integrative (Pasar Pagi), pembangunan ruang publik terbuka yang inklusif dan multi fungsi yang mampu mendorong berbagai aktivitas masyarakat (rehabilitasi Alun alun dan pembangunan Pusat Kuliner “Kapal Mendoan” (Mangan Enak karo Dolan), pembangunan aksesibilitas ruang publik terbuka yang berkualitas (revitalisasi jalan).

7. MIE KERITING (Makanan Instan cegah KERdil dan stunting)

Merupakan inovasi yang diusung oleh Kabupaten Kebumen melalui UPTD Puskesmas Kebumen 2. Sebagai salah satu upaya mewujudkan Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Kebumen, Puskesmas Kebumen II berhasil menciptakan sebuah inovasi di bidang pangan yaitu “MIE KERITING”. Inovasi ini muncul dengan adanya prevalensi angka stunting yang cukup tinggi. Inovasi Mie Keriting merupakan makanan instan yang dibuat dari bahan utama ganyong dan kelor, serta bahan lain yang dibutuhkan sesuai “ISI PIRINGKU”, Mie Keriting telah melalui uji laboratorium, memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), izin edar/P-IRT, hak cipta, SK Gubernur Jateng Pemenang Inovasi, hak paten, MoU dengan BRIDA Jateng.

MIE KERITING sebagai peluang baru untuk pengembangan produk yang bermanfaat dalam pencegahan stunting dan untuk menunjang pertumbuhan balita atau sebagai alternatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting. Inovasi MIE KERITING merupakan pemenang utama dari Lomba KRENOVA Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 dan pemenang harapan Lomba KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pada Tahun 2023 Inovasi MIE KERITING berhasil masuk dalam nominasi TOP 45 Inovasi Kemenpan RB Republik Indonesia. Tingkat keberhasilan inovasi MIE KERITING dibuktikan adanya penurunan angka prevalensi stunting yang semula 18,31% (2020) turun menjadi 12,03% (2021) di wilayah kerja Peskesmas Kebumen 2.

8. Inovasi BUMD Aneka Usaha Kebumen Jaya (*off-taker* hasil pertanian pada *corporate farming*)

BUMD PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dan bertujuan untuk mengelola sumber daya dan layanan ekonomi tertentu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kebumen. Off-taker akan bisa menjadi bagian penting dari strategi penjualan dan pemasaran *corporate farming*, terutama untuk menghasilkan produk pertanian dalam skala besar. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) bertindak sebagai *off-taker* yang akan membeli produk pertanian dihasilkan oleh *corporate farming* di Kabupaten Kebumen.

Program *corporate farming* akan dikelola oleh 14 kelompok di 8 kecamatan pada musim tanam 2 berlangsung yaitu bulan April karena menggunakan metode pethuk galur dengan metode pembiayaan adalah Yarnen. PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) akan mengambil hasil petani dengan kualitas bagus dan ada sistem perjanjian dengan petani terkait pengambilan hasil panen. Kegiatan ini akan tergantung pada strategi bisnis *corporate farming*, kebutuhan pasar dan kondisi ekonomi serta regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. *Corporate farming* harus selalu menjalin

hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan *off-taker* guna memastikan pasokan dan penjualan produk yang lancar.

Beberapa dampak positif dengan adanya inovasi ini, antara lain: a). Peningkatan efisiensi: *Corporate farming* menggunakan teknologi modern dan operasi skala besar, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi beras, b). Akses terhadap modal dan sumber daya: *Corporate farming* memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, mesin, dan teknologi yang lebih besar, yang dapat membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi, c). Akses pasar: Penetrasi *Corporate farming* memiliki akses yang lebih baik ke pasar, jaringan distribusi, dan pembeli sehingga memberikan lebih banyak peluang bagi petani padi untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, d). Pendapatan yang stabil: Bekerja dengan entitas *Corporate farming*, petani padi memiliki pendapatan yang lebih stabil melalui kontrak atau harga yang terjamin, sehingga mengurangi paparan mereka terhadap fluktuasi pasar.

1.2 Prestasi Daerah Tahun 2023

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan manusia dan pelayanan publik telah menghasilkan penghargaan-penghargaan sebagai berikut :

1. Top Pembina BUMD 2023
2. Kabupaten Kreatif Indonesia
3. Penghargaan Bakti Ekonomi Desa
4. Peringkat 10 besar nasional untuk layanan pelatihan dan pendampingan rutin Digitalisasi Usaha dan Marketing serta Advertising (Iklan) bagi PLUT Kebumen
5. Pasar rakyat bersertifikat SNI
6. Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Tahun 2023 Kategori Nindya
7. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Anugerah Revolusi Mental 2023 dari Kemenko PMK untuk kategori gerakan Indonesia Mandiri
9. Penanganan terhadap penyakit Frambusia di masyarakat
10. Penghargaan Obsession Award 2023 Kategori Best Regional leaders atau pimpinan daerah terbaik
11. Kabupaten Terbaik Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023
12. Zona Hijau atau Opini Kualitas tertinggi oleh ombudsman RI
13. Digital Government Award atau Anugerah pemerintahan digital Tahun 2023
14. Kategori Baik dalam penerapan system Merit Manajemen ASN 2023
15. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 Kategori B Predikat Baik
16. Penghargaan indeks kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Predikat Baik.